



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2015)

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang berada pada regional Pulau Kalimantan dimana terdapat beraneka ragam potensi sumber daya alam sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan. Selain itu, wilayah yang luas dan kondisi geografis yang cukup strategis menjadikan setiap daerah di Provinsi Kalimantan Tengah layak untuk diperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya. Terkait hal tersebut, fenomena yang riil terjadi adalah penggunaan sumber daya sungai sebagai salah satu penopang kehidupan utama masyarakat Kalimantan Tengah sejak jaman dulu sehingga banyaknya sungai maupun anak sungai menjadi nilai positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Tengah lahir dari penataan kembali Provinsi di Kalimantan, di mana dahulunya provinsi ini merupakan wilayah Kalimantan Selatan. Selama pembentukan wilayah administrasi tingkat I (Provinsi) Kalimantan Tengah, tahapan demi tahapan pelaksanaan pembangunan daerah telah direncanakan, dicanangkan, dan direalisasikan hingga periode saat ini sebagai upaya pencapaian target pembangunan daerah (khususnya) maupun pembangunan nasional pada umumnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk lebih meningkatkan kuantitas utamanya kualitas hasil pembangunan, evaluasi program kegiatan maupun capaian kinerja pemerintah daerah harus dilaksanakan seoptimal mungkin sebagai syarat mutlak penentuan keberhasilan perencanaan pembangunan yang telah disusun utamanya pada pelaksanaan perencanaan pembangunan ke depannya. Evaluasi pembangunan daerah harus memiliki integrasi antar dokumen perencanaan sebagai poin penting dalam menyempurnakan setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode ke depannya.

Pada perkembangannya, perlu dilakukan pula analisa singkat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, hingga permasalahan pembangunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja aparatur kelembagaan pemerintahan yang akan datang sebagai masukan dalam merumuskan setiap detail sasaran hingga program kegiatan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.



2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berdiri setelah adanya restrukturisasi provinsi di Pulau Kalimantan dimana dahulu jika merunut wilayah geografisnya maka merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki cukup banyak karakteristik Pulau Kalimantan yakni luasnya wilayah hutan, rawa-rawa, hingga gambut. Selain itu juga masih banyak sungai-sungai yang melewati berbagai wilayah di daratan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sungai Barito sebagai sungai yang terpanjang (mencapai 900 km).

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ibukota provinsi di Kota Palangka Raya yang berada di tengah wilayah Kalimantan Tengah atau berada di titik sentral seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadikan pembangunan daerah antara ibukota provinsi dan kabupaten memiliki kesetaraan dalam pencapaian kualitas pembangunan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kelebihan dalam pencapaian pembangunan daerah seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Utara, maupun Kotawaringin Barat. Simultannya pembangunan daerah yang terjadi di setiap kabupaten/kota ini dimungkinkan karena letak pusat pemerintahan yang strategis sehingga membuka peluang tumbuhnya wilayah-wilayah yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan letak, luas dan batas wilayah, kondisi topografi, geologi dan tanah, hidrologi, dan klimatologi.

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Letak Geografis, Batas, dan Luas Wilayah

Berdasarkan lokasinya, Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur hingga 115°51' Bujur Timur. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas-batas wilayah dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan yakni sebagai berikut:

Batas utara : Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
Batas timur : Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
Batas selatan : Laut Jawa; serta
Batas barat : Kalimantan Barat



Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai $\pm 153.564,5$ km². Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menurut kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kotawaringin Barat	10.759,0	6	94
2	Kotawaringin Timur	16.796,0	17	185
3	Kapuas	14.999,0	17	233
4	Barito Selatan	8.830,0	6	95
5	Barito Utara	8.300,0	9	103
6	Sukamara	3.827,0	5	32
7	Lamandau	6.414,0	8	83
8	Seruyan	16.404,0	10	100
9	Katingan	17.500,0	13	161
10	Pulang Pisau	8.997,0	8	99
11	Gunung Mas	10.805,0	12	127
12	Barito Timur	3.834,0	10	103
13	Murung Raya	23.700,0	10	124
14	Kota Palangka Raya	2.399,5	5	30
Kalimantan Tengah		153.564,5	136	1.569

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Kabupaten/kota terluas di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Murung Raya yang memiliki wilayah seluas 23.700 km² atau 15,43 persen dari total luas wilayah. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kota Palangka Raya yang hanya memiliki luas 1,56 persen dari total wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah, dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi landai hingga kemiringan tertentu dan memiliki pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sedangkan pada sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam dan bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian mencapai 1.660 meter dpl.



3. Geologi dan Tanah

Dalam rangka pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, berbagai data dan informasi dasar terkait dengan potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung, dan kerawanan fisik berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan. Perihal potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah tergolong memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kelas IV, V, dan III dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit.

4. Hidrologi

Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar yang berhulu di sektor utara. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut (khususnya pada musim kemarau) relatif jauh. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Selain itu, rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Sedangkan wilayah bagian hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam.

5. Klimatologi

Iklm di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada pada titik-titik tertentu seperti yang tertera di table 2.1. Berdasarkan pengamatan klimatologi, suhu udara maksimum mencapai 36,8 derajat celcius yang berada di Buntok, namun rata-rata suhu udara tertinggi berada di Kota Palangka Raya dan Muara Teweh yakni mencapai 27,1. Selain itu, kelembaban udara dan persentase penyinaran matahari tertinggi berada di Pangkalan Bun, namun curah hujan bulanan tertinggi berada di Buntok.

Tabel 2.2
Klimatologi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

No	Indikator	Pangkalan Bun	Sampit	Buntok	Muara Teweh	Palangka raya
1	Suhu Udara					
	- Maksimum	32,8	33,2	32,6	32,7	32,5
	- Minimum	23,1	22,6	23,6	23,9	23,7
	- Rata-rata	26,8	27,0	27,0	27,3	27,4



No	Indikator	Pangkalan Bun	Sampit	Buntok	Muara Teweh	Palangka raya
2	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	89,1	82,6	87,4	83,5	82,9
3	Tekanan Udara (mbs)	1.010,1	1.011,1	1.013,2	1.012,6	1.013,4
4	Kecepatan Angin (knot)	2,7	2,3	2,8	4,4	4,1
5	Curah Hujan Bulanan (m3)	2.344,7	2.241,1	2.750,5	2.671,6	2.853,6
6	Penyinaran Matahari (%)	65,8	56,7	49,1	49,1	54,4

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka 2015

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan pola lahan areal hutan dan pola penggunaan lahan areal non hutan

a) Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan

Kondisi-kondisi fisik wilayah secara alamiah menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori bio-region hutan. Selain itu, pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah juga masih menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga saat ini, wilayah hutan mendominasi di semua kabupaten/kota (termasuk di wilayah Kota Palangka Raya) kecuali di Kabupaten Barito Timur dominasi wilayah hutan kurang dominan.

b) Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan pertanian. Areal-areal penggunaan pertanian non perkebunan besar dan areal pemukiman berkembang sepanjang sungai-sungai besar yang melintasi daratan. Meskipun begitu, areal-areal perkebunan besar memulai pola perkembangan berbeda dimana tidak cenderung mengikuti sungai besar karena disesuaikan dengan infrastruktur penunjang lainnya seperti aksesibilitas wilayah hingga tipologi jenis tanah.

c) Kawasan Rawan Bencana

Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 153,564 Km² (15.356.700 Ha) memiliki lahan gambut di wilayah selatan seluas 3.010.640 Ha dengan kedalaman 0-2 Meter seluas 1.496.875 Ha dan kedalaman di atas 2 Meter seluas 1.513.765 Ha. Lahan gambut ini merupakan daerah rawan kebakaran karena telah mengalami degradasi akibat pembukaan kanal untuk proyek PLG.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dilaporkan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi bencana kebakaran hutan dan



lahan sebanyak 34 kali yang terjadi sejak bulan juni sampai dengan bulan Oktober di sepanjang tahun 2015 dimana kebakaran paling banyak terjadi pada bulan Juli dan Agustus yang berdampak terhadap kasus kabut asap disebagian besar wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah. Bencana tersebut berdampak terhadap perekonomian masyarakat, kesehatan dan pendidikan pada hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau, Barito Selatan dan Kabupaten Katingan. Bencana kabut asap tersebut juga berdampak terhadap perhubungan udara pada bulan September dan Oktober, mengakibatkan sebagian besar pesawat yang menuju Bandara di Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa beroperasi karena tidak mampu mendarat karena pendeknya jarak pandang, sehingga penumpang pesawat beralih ke bandara terdekat di Banjarmasin. Kejadian kebakaran inilah yang menyebabkan Provinsi Kalimantan Tengah dianggap sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar dalam satu dekade terakhir. Bencana lainnya yang cukup rawan terjadi adalah banjir dimana selama tahun 2015 telah terjadi 12 kejadian bencana banjir dengan jumlah kejadian yang cukup tinggi yaitu di Kabupaten Barito Utara, Katingan, Gunung Mas Kotawaringin Timur, Murung Raya dan Kota Palangka Raya

Terkait dengan hal tersebut, dampak kebakaran hutan pada tahun 2015 sangat tinggi baik dalam bidang perekonomian maupun pembangunan daerah secara umum. Hal ini dikarenakan asap yang merupakan hasil ikutan dari proses pembakaran telah menyebar dan cukup pekat sehingga sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat sehari-hari. Asap yang disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan gambut ini harus diantisipasi dikemudian hari dengan menelaah faktor-faktor penyebab kebakaran apa saja yang mendominasi terjadinya bencana ini.

Berdasarkan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), adanya kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan akibat aktivitas manusia (95%). Aktivitas *land clearing* merupakan factor utama penyebab kebakaran hutan dan lahan (55%) dengan berbagai motif beragam mulai dari pembukaan lahan kelapa sawit, lahan pertanian masyarakat, maupun pembalakan hutan. Luas lahan yang terbakar pada tahun 2015 ini mencapai 10,015 Ha dengan titik hotspot sebanyak 5.176 titik hingga Oktober 2015 dan luas lahan yang terbakar ini meningkat sebanyak 61,59 persen jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.

**d) Demografi**

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang merupakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting adanya melihat pertumbuhan demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

a. Gambaran Umum Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah

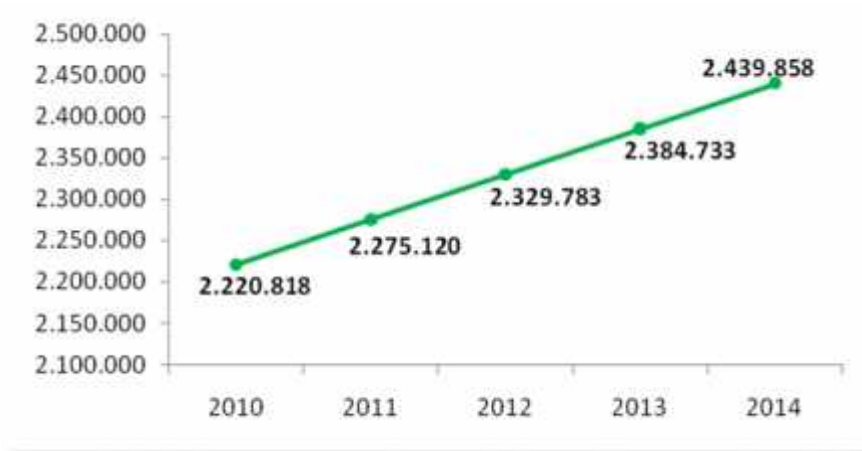
Pada Provinsi Kalimantan Tengah terjadi pertumbuhan penduduk dari tahun 2013 ke 2014 sebesar 2,31 persen sehingga menyebabkan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 menjadi sebanyak 2.439.858 jiwa yang terdiri atas 1.273.302 laki-laki dan 1.166.556 perempuan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, penyebaran penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tampak masih bertumpu pada beberapa kabupaten induk. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Kotawaringin Barat adalah tiga kabupaten dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk mayoritas dengan masing-masing kabupaten dihuni penduduk berjumlah 416.151 orang, 344.955 orang, dan 269.629 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang minoritas berada di Kabupaten Sukamara dan Lamandau dengan penduduk yang berjumlah 53.190 orang dan 71.798 orang.

Tabel 2.3
Statistik Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Pertumbuhan Penduduk
1	Kotawaringin Barat	269.629	25	3,21
2	Kotawaringin Timur	416.151	25	2,57
3	Kapuas	344.955	23	0,99
4	Barito Selatan	130.609	15	1,08
5	Barito Utara	126.494	15	0,85
6	Sukamara	53.190	14	4,07
7	Lamandau	71.798	11	3,00
8	Seruyan	167.621	10	4,39
9	Katingan	157.654	9	1,66
10	Pulang Pisau	124.015	14	0,60
11	Gunung Mas	107.467	10	2,41
12	Barito Timur	110.446	29	2,92
13	Murung Raya	107.724	5	2,51
14	Kota Palangka Raya	252.105	105	3,13
Kalimantan Tengah		2.439.858	16	2,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Gambar 2.1
Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Provinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh hampir seluruh anak suku bangsa yang ada di Indonesia dengan kepadatan penduduk sekitar 16 orang per kilometer persegi. Meskipun sudah banyak kebudayaan multietnis dan multi budaya yang hadir di Provinsi Kalimantan Tengah, namun etnis awal yaitu suku Dayak masih eksis berkembang di beberapa wilayah. Hal inilah yang menjadikan kebudayaan masyarakat masih melekat dengan karakteristik budaya yang khas.

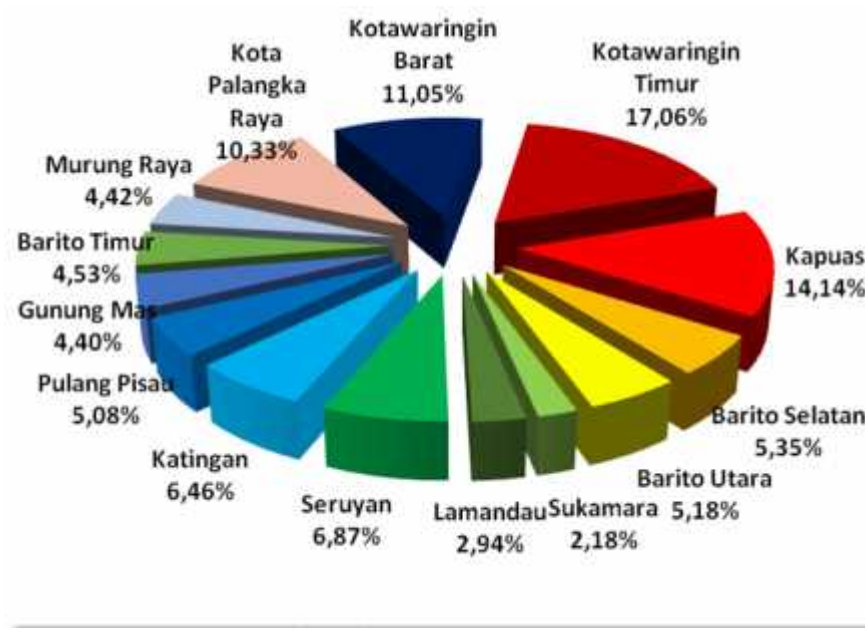
b. Sex Ratio Penduduk Kalimantan Tengah

Data *Sex Ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. *Sex ratio* penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 sebesar 109, yang memiliki arti bahwa disetiap 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. Besarnya angka *sex ratio* ini tidak bergerak dari angka 109 selama kurun waktu lima tahun terakhir.

c. Distribusi Penduduk Kalimantan Tengah

Jika dilihat secara umum, penyebaran penduduk di Kalimantan Tengah cukup merata dengan basis kependudukan terpusat di Kotawaringin Timur (17,06%), Kapuas (14,14%), dan Kotawaringin Barat (11,05%). Sedangkan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah menduduki peringkat ke empat populasi penduduk dengan persentase penduduk 10,33 persen. Sedangkan penduduk dengan persentase terkecil adalah Kabupaten Sukamara sebesar 2,18 persen dan Kabupaten Lamandau sebesar 2,94 persen.

Gambar 2.2
Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2015

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus pembangunan daerah yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Penjabaran pada masing-masing fokus aspek kesejahteraan masyarakat dapat terlihat pada analisa di bawah ini.

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, indikator yang umum dipakai untuk mengetahui tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bersangkutan baik migas maupun non migas termasuk turunannya seperti pertumbuhan ekonomi maupun struktur ekonominya. Selain itu, indikator lain yang juga dapat memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah laju inflasi dan indeks gini (*gini ratio*). Pada intinya, fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi memperlihatkan kondisi perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah baik secara makro tanpa mengindahkan fenomena mikro perekonomian masyarakat.



a. Pertumbuhan PDRB Regional

Pembangunan daerah tidak pernah terlepas dari pertumbuhan ekonomi regional baik mikro maupun makro. Berkenaan dengan hal tersebut, sektor-sektor lapangan usaha yang memberikan nilai tambah bagi produksinya akan menjadikan roda ekonomi wilayah berputar meskipun ada beberapa investasi yang berasal dari luar daerah. Kontribusi sektor ekonomi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan sektor andalan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sektor ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah.

Secara definitif, PDRB adalah jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Di Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi kenaikan nilai PDRB dari tahun ke tahun secara konsisten dimana pada tahun 2014, angka PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur berdasarkan atas dasar harga berlaku mencapai 89.871,73 miliar rupiah, dan untuk tahun 2015 mencapai Rp 100.148,2 milyar sehingga PDRB per kapita mencapai Rp 40,14 juta. Sedangkan perekonomian Kalimantan Tengah Triwulan I-2016 (y on y) yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 26.670,8 milyar.

Gambar 2.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Milyar Rupiah)



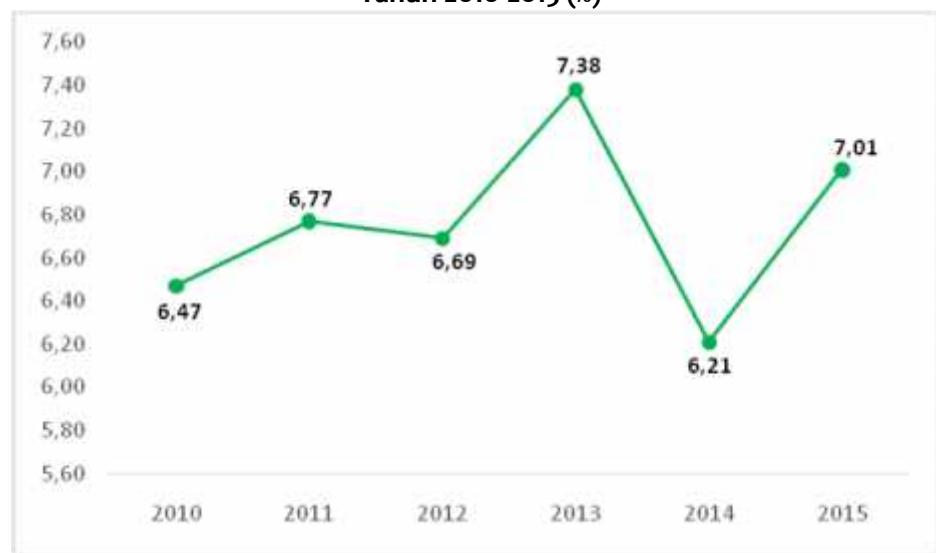
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun dasar 2010)



Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah cukup stabil di antara kisaran 6 persen hingga 7 persen. Pada tahun 2014, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh 6,21 persen dimana mengalami perlambatan perekonomian jikadibanding tahun 2013 yang sebesar 7,38 persen. Namun pada tahun berikutnya, pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2015 (c to c) tumbuh sebesar 7,01 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih yang tumbuh 25,54 persen.

Dari sisi pengeluaran didukung oleh semua komponen dengan pertumbuhan tertinggi dicapai komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 10,72 persen. Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2016 terhadap triwulan I-2015 (y on y) tumbuh 5,17 persen, melambat dibanding capaian triwulan IV-2015 yang tumbuh 6,56 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Pendidikan yang tumbuh 12,70 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan didukung oleh semua komponen dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPR) yang tumbuh sebesar 13,40 persen.

Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2015 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun dasar 2010)



Tabel 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2015 (%)

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,46	6,71	5,32
2	Pertambangan dan Penggalian	15,97	-2,87	2,04
3	Industri Pengolahan	7,89	12,16	6,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,06	16,07	25,54
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5,40	4,47	3,32
6	Konstruksi	3,08	9,92	9,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,29	7,68	8,29
8	Transportasi dan Pergudangan	11,52	2,14	13,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,00	8,21	8,28
10	Informasi dan Komunikasi	9,90	12,08	5,23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55	6,66	2,16
12	Real estate	6,99	7,11	8,56
13	Jasa Perusahaan	7,76	4,54	7,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,00	8,86	15,34
15	Jasa Pendidikan	4,55	9,67	10,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,77	8,86	9,73
17	Jasa Lainnya	4,98	8,86	7,56
Provinsi Kalimantan Tengah		7,38	6,21	7,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Jika dilihat berdasarkan kategori lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 25,54 persen, diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,34 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,57 persen.

Pada sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 15,97 persen terjadi penurunan cukup besar yang mana pada tahun 2014 terdapat pertumbuhan negatif sebesar 2,87 persen dan pada tahun 2015 tumbuh positif sebesar 2,04 hal ini salah satunya disebabkan karena adanya pemberlakuan Undang Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mengatur larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah yang mulai berlaku 12 Januari 2014, dengan tujuan untuk menaikkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya Undang-undang ini, pengusaha dilarang

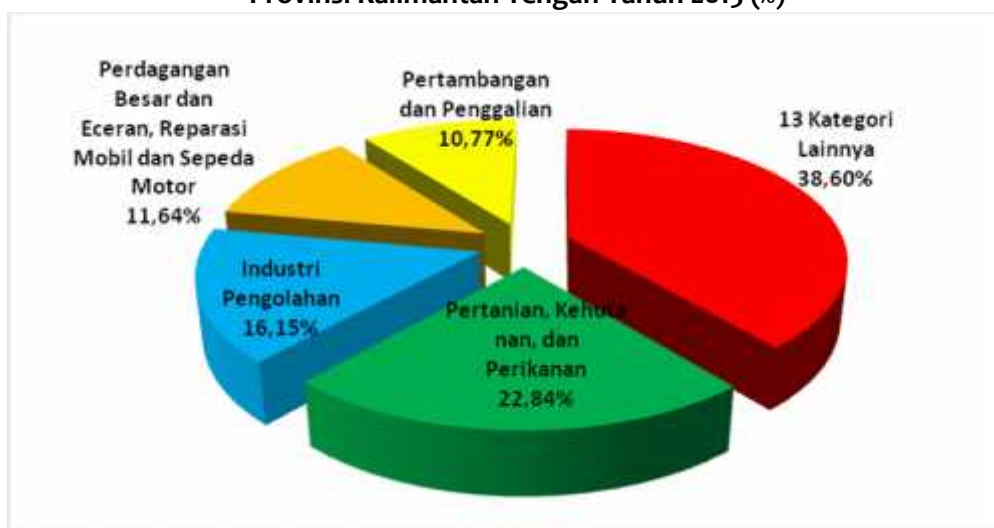
mengekspor enam jenis bahan mentah yaitu emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga, dan batu bara sebelum diolah.

b. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,84 persen); Industri Pengolahan (16,15 persen), Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,64 persen) dan Pertambangan dan Penggalian (10,77 persen).

Selain itu, terdapat juga kontribusi yang cukup besar pada sektor-sektor lain seperti perdagangan besar dan eceran (termasuk reparasi mobil dan sepeda motor), konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Gambar 2.5
Struktur Perekonomian
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun dasar 2010)

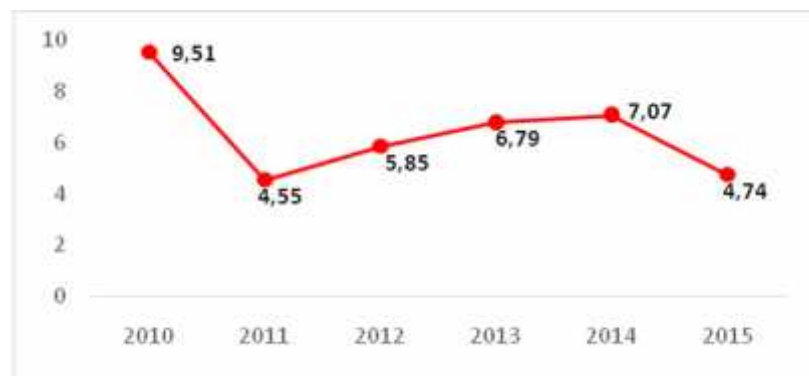
c. Laju Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Selain itu, laju inflasi juga merupakan proses dari suatu peristiwa dalam pasar dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga tinggi belum tentu menunjukkan besaran inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi secara *series* dalam kurun waktu tertentu.



Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, inflasi Provinsi Kalimantan Tengah sedang menuju suatu kestabilan harga dimana laju inflasi berada pada tingkatan normal di kisaran ± 6 persen. Laju inflasi pada tahun 2014 mencapai 7,07 persen dan tahun sebelumnya 6,79 persen. Pada bulan Desember 2015 inflasi Kalimantan Tengah yang merupakan gabungan dari Kota Palangka Raya dan Kota Sampit mengalami inflasi sebesar 1,05 persen. Laju inflasi tahun kalender 2015 dan laju inflasi “year on year” Desember 2015 sebesar 4,74 persen. Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Gambar 2.6
Laju Inflasi Tahunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2016

Tabel 2.5
Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2015 (%)

Keterangan (Inflasi-yoy)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inflasi Tahunan Palangka Raya	11,65	1,39	9,49	5,28	6,73	6,45	6,63	4,20
Inflasi Tahunan Sampit	8,89	2,85	9,53	3,60	4,69	7,25	7,90	5,72
Inflasi Kalimantan Tengah	10,44	2,02	9,51	4,55	5,85	6,79	7,07	4,74
Inflasi Nasional	11,06	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2016

Stabilnya laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari realisasi inflasi Kota Palangka Raya sebesar 4,20 persen (yoy) dan Sampitsebesar 5,72



persen (yoy) pada Desember 2015. Kedua wilayah tersebut merupakan Kota Indeks Harga Konsumen yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penghitungan laju inflasi. Jika dilihat dari data *seriesnya*, maka inflasi kedua kota tersebut tidak bisa dibandingkan dan diprediksi karena tingkat fluktuatif yang cukup signifikan dan keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri sesuai pembentukan kondisi pasar di masyarakat.

Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *stakeholder* yang menangani pengendalian inflasi

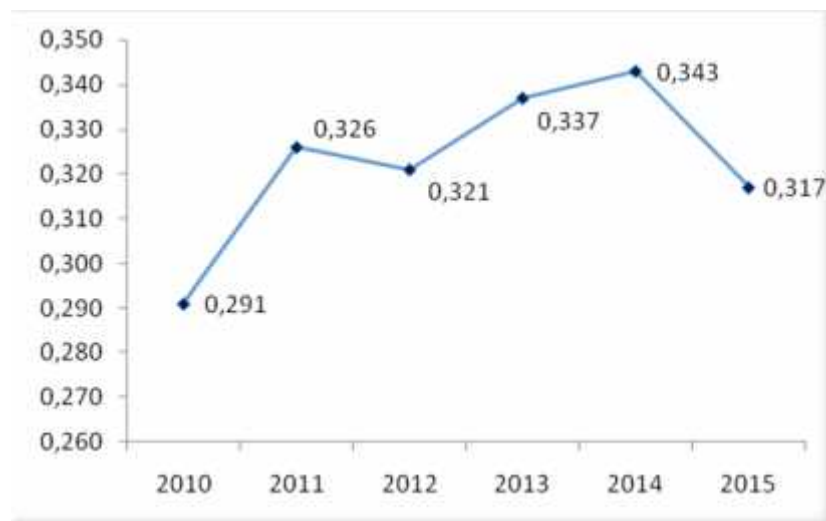
daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga positif yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat.

d. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Indeks Gini Kalimantan Tengah tahun 2015 menurun sebesar 0,026 dari tahun 2014 sebesar 0,343 menjadi 0,317 pada tahun 2015. Penurunan angka indeks gini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat di Kalimantan Tengah pada periode laporan lebih baik dibandingkan tahun 2014. Angka indeks gini Kalimantan Tengah tersebut masih berada di bawah angka indeks gini nasional sebesar 0,41.

Gambar 2.7
Indeks Gini
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Jika melihat angka indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah, maka terindikasi bahwa terjadi penambahan ketimpangan pendapatan antar penduduk secara berkala. Secara umum peningkatan indeks gini memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin “tidak merata” dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap “wajar” pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri bagi *subject matter* kesejahteraan rakyat agar lebih menindaklanjuti program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

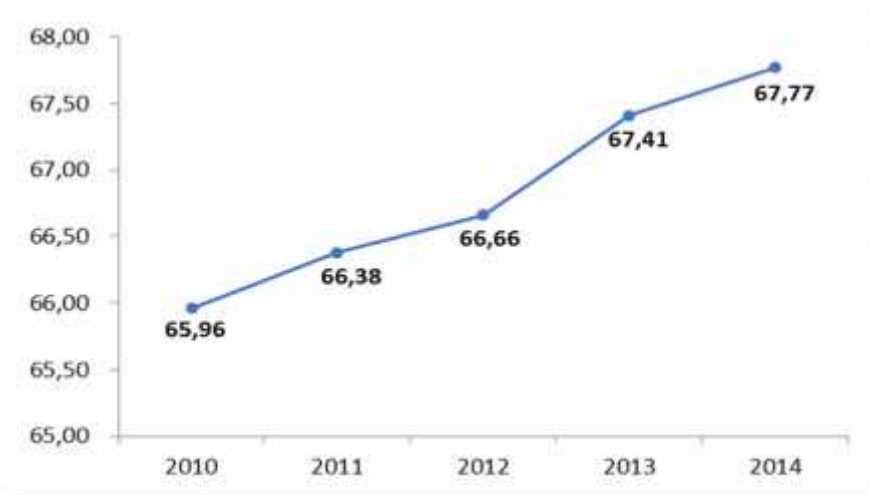
2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta seni budayawan olahraga. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Gambar 2.8
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2010, IPM Provinsi Kalimantan Tengah sudah termasuk kategori sedang, yakni mencapai angka 65,96 dan seiring berjalannya waktu, IPM terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2014 IPM mencapai angka 67,77. Peningkatan IPM yang konsisten di tiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan komponen-komponen penyusunnya baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomiannya.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota



Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kotawaringin Barat	68,43	68,53	68,63	69,51	70,14
2	Kotawaringin Timur	65,24	65,60	66,61	67,95	68,45
3	Kapuas	63,32	64,01	64,38	64,82	65,29
4	Barito Selatan	64,51	65,10	65,76	66,20	66,61
5	Barito Utara	63,87	64,36	64,72	65,12	66,30
6	Sukamara	62,41	62,86	63,52	63,92	64,44
7	Lamandau	65,32	65,99	66,49	67,23	67,53
8	Seruyan	61,60	62,16	62,39	62,81	63,49
9	Katingan	63,25	64,54	64,87	65,29	65,79
10	Pulang Pisau	63,76	64,06	64,28	64,76	65,00
11	Gunung Mas	66,33	66,85	67,30	67,75	68,13
12	Barito Timur	66,76	67,31	67,97	68,82	69,12
13	Murung Raya	63,18	64,39	64,85	65,62	66,10
14	Kota Palangka Raya	76,53	76,98	77,40	78,02	78,50
Kalimantan Tengah		65,96	66,38	66,66	67,41	67,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi berada di Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dengan IPM sebesar 78,50. Sedangkan kabupaten/kota yang Indeks Pembangunan Manusianya terendah adalah Kabupaten Seruyan dengan indeks sebesar 63,49. Berikut data komponen-komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dari aspek kesehatan dan pendidikan menurut kabupaten/kota.

Tabel 2.7
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kotawaringin Barat	69,77	12,12	7,82
2	Kotawaringin Timur	69,41	12,04	7,69
3	Kapuas	68,30	11,14	6,94
4	Barito Selatan	66,08	11,14	8,27
5	Barito Utara	70,91	11,15	8,00
6	Sukamara	71,19	11,09	7,30



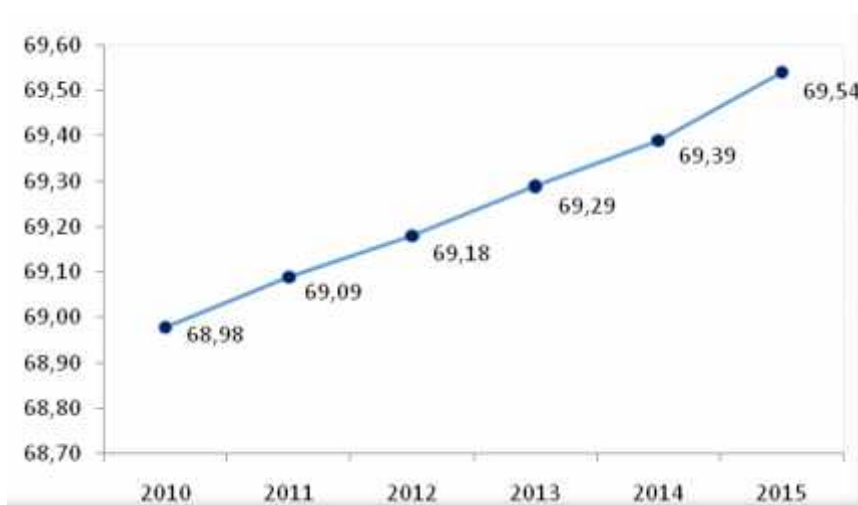
No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Lamandau	69,07	11,80	7,67
8	Seruyan	68,58	11,08	7,03
9	Katingan	64,98	11,69	8,23
10	Pulang Pisau	67,44	11,63	7,58
11	Gunung Mas	69,59	10,82	8,74
12	Barito Timur	67,41	11,98	9,01
13	Murung Raya	69,11	11,68	7,18
14	Kota Palangka Raya	72,95	14,89	10,73
Kalimantan Tengah		69,39	11,93	7,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

b. Kesehatan

Capaian di bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2015. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat terlihat dari trend kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 yang mencapai 69,54 tahun yang berarti bahwa bayi yang baru dilahirkan pada tahun 2015 akan memiliki peluang hidup hingga berumur 69-70 tahun dimana angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya (69,39 tahun).

Gambar 2.9
Angka Harapan Hidup
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

c. Pendidikan



Secara umum, bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat. Pada tahun 2014, angka harapan lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 11,93 tahun yang berarti bahwa penduduk saat ini memiliki harapan untuk mengikuti jenjang pendidikan hingga 11,93 tahun lamanya atau sama dengan jenjang SMA kelas tiga semester akhir.

Terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah selama 7,62 tahun dan setelah lima tahun berselang angka tersebut baru beranjang hingga 7,82 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2014 sebesar 7,82 tahun memiliki analisa awal bahwa masyarakat usia 15 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah hingga jenjang pendidikan SMP kelas 2 semester kedua.

Tabel 2.8
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014

No	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2010	11,09	7,62
2	2011	11,15	7,68
3	2012	11,22	7,73
4	2013	11,71	7,79
5	2014	11,93	7,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

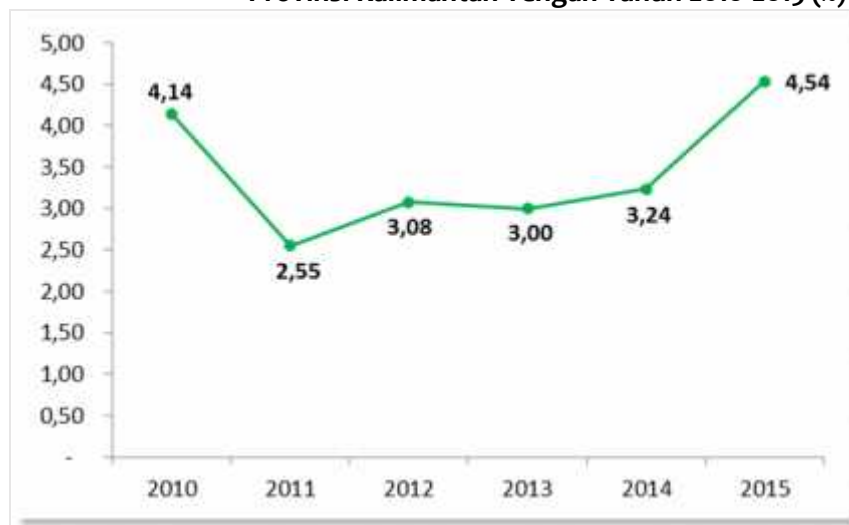
d. Tingkat Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2016 mencapai 1.285.916 orang, berkurang sebanyak 2.147 orang dibanding keadaan Februari 2015 dan bertambah sebanyak 38.146 orang dibanding Februari 2014. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2016 mencapai 1.238.677 orang berkurang sebanyak 8.947 orang dibanding keadaan Februari 2015 dan bertambah sebanyak 24.692 orang dibanding keadaan Februari 2014.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2016 sebesar 3,67 persen, mengalami peningkatan dibanding TPT Februari 2015 maupun TPT Februari 2014 yang besarnya mencapai masing-masing 3,14 persen dan 2,71 persen.

Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 (Agustus) mencapai 4,54 persen, dimana angka ini mengalami peningkatan secara landai dari tahun 2011 hingga periode saat ini. Jika dilihat secara umum, tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah tergolong rendah jika dibandingkan angka nasional, namun trend kenaikan angka pengangguran selama empat tahun terakhir perlu mendapat perhatian khusus oleh *stakeholders* ketenagakerjaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan utamanya dalam mengatasi jumlah pengangguran.

Gambar 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

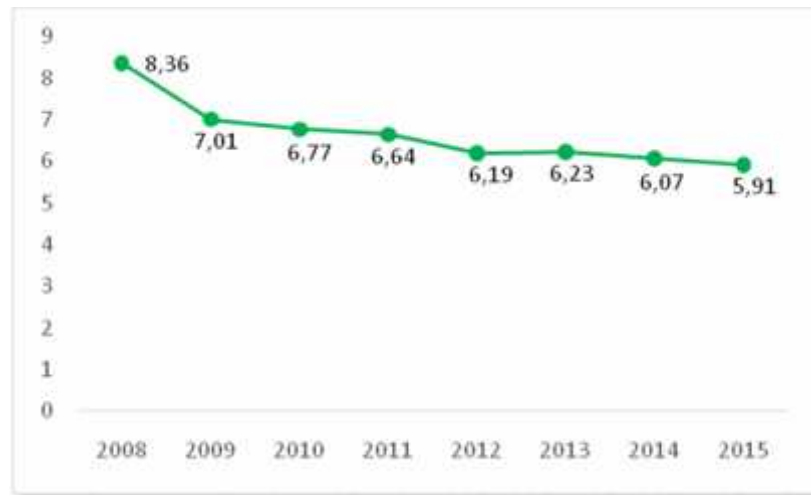
e. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik dalam wilayah administrasi pemerintahan dimana fenomena tersebut dikatakan akan selalu ada selama suatu regional berdiri. Oleh karenanya, dalam setiap rumusan perencanaan pembangunan daerah selalu tercantum kebijakan terkait pengentasan kemiskinan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Gambar 2.11



Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2015 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Secara umum, angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara bertahap namun konsisten. Pada tahun 2008, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 8,36 persen yang pada tahun berikutnya langsung menurun drastis hingga mencapai angka 7,01 persen. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, tingkat kemiskinan secara konsisten menurun landai hingga akhirnya pada tahun 2013 mencapai 6,23 persen dan menurun kembali pada tahun berikutnya hingga mencapai angka 6,07 persen.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah pada September 2015 mencapai 148.129 orang (5,91 persen), berkurang 696 orang (0,16 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang berjumlah 148.825 orang (6,07 persen). Selama periode September 2014 – September 2015 penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 9.271 orang (dari 39.452 orang pada September 2014 menjadi 48.723 orang pada September 2015), sementara di daerah perdesaan berkurang 9.967 orang (dari 109.373 orang pada September 2014 menjadi 99.406 orang pada September 2015). Penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 4,75 persen, naik menjadi 5,68 persen pada September 2015. Sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 6,74 persen pada September 2014 menjadi 6,02 persen pada September 2015.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota pada tahun 2013, angka kemiskinan tertinggi berada di wilayah Kabupaten Barito Timur dengan persentase



kemiskinan sebesar 8,83 persen dan Kabupaten Seruyan sebesar 8,77 persen. Namun, jika dilihat angka absolut jumlah penduduk miskin, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yakni sebanyak 28.000 jiwa.

Tabel 2.9
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013 (Kondisi September)

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kotawaringin Barat	273.467	5,44	14,3
2	Kotawaringin Timur	300.929	6,85	28,0
3	Kapuas	235.187	6,19	21,2
4	Barito Selatan	311.166	6,26	8,1
5	Barito Utara	355.065	5,98	7,5
6	Sukamara	344.545	4,56	2,4
7	Lamandau	312.204	4,87	3,4
8	Seruyan	321.204	8,77	14,2
9	Katingan	325.773	6,55	10,2
10	Pulang Pisau	294.250	5,45	6,7
11	Gunung Mas	317.979	6,9	7,3
12	Barito Timur	373.579	8,83	9,5
13	Murung Raya	353.373	6,44	6,8
14	Kota Palangka Raya	281.323	3,94	9,7
Kalimantan Tengah		307.698	6,23	149,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

3. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya, dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan tersier. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial, budaya, dan keagamaan yaitu:

- a. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; serta
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Kesadaran akan pentingnya seni dan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta



menciptakan iklim kondusif dan harmonis. Sedangkan pembangunan dan kemajuan di bidang olahraga, selain mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, juga meningkatkan martabat dan nama baik negara/daerah dalam pergaulan nasional dan daerah.

Pada tahun 2015, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 343 grup kesenian/sanggar seni dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya sekali dalam tahun tersebut. Selain itu, terdapat pula 500 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel 2.10
Statistik Seni, Budaya, dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (buah)	343	343	343	343	343
2	Jumlah gedung (unit)	19	19	19	19	19
3	Jumlah klub olahraga (buah)	-	-	26	46	46
4	Jumlah gedung olahraga (unit)	15	15	15	16	16
5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	2	1	2	1
6	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	487	487	490	490	500
7	Jumlah organisasi pemuda	66	66	66	66	66
8	Jumlah organisasi olahraga	42	42	42	43	42
9	Jumlah kegiatan kepemudaan	67	60	60	40	35
10	Jumlah kegiatan olahraga	31	35	45	76	60
11	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah)	33	34	37	37	37
12	Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)	210	289	289	289	289

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2015 dan Dinas Pemuda dan OlahRaga Provinsi Kalteng, 2016

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda akan menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam partisipasi membangun daerah. Adapun jumlah organisasi pemuda di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 66 organisasi dengan 35 kegiatan kepemudaan pada tahun 2015. Selain itu, kegiatan kepemudaan juga difasilitasi 37 gelanggang/balai remaja.



Sedangkan banyaknya jumlah organisasi olahraga (yang berada dibawah naungan KONI kabupaten/kota) menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga di Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini, jumlah organisasi olahraga yang berada di bawah binaan KONI Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 42 organisasi olahraga dengan 60 kali kegiatan olahraga pada tahun 2015. Selain itu, kegiatan keolahragaan juga difasilitasi 16 gedung olahraga dan 289 lapangan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan, dan sebagainya yang merupakan pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan kondisi pelayanan pilihan dapat diketahui dari beberapa bidang yakni pertanian, pariwisata, jasa dan perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, dan sebagainya yang menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah.

1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib

a) Pendidikan

Gambaran umum keadaan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain tercermin dari angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 pada tahun 2011 mencapai 98,84 persen dan meningkat menjadi 99,26 persen pada tahun 2015. Sedangkan partisipasi sekolah pada penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari sebesar 84,59 persen pada tahun 2011 menjadi 85,61 persen pada tahun 2015. Sama halnya untuk penduduk usia 16-18 tahun, angka partisipasi sekolahnya meningkat dimana pada tahun 2011 memiliki angka partisipasi sekolah sebesar 55,06 persen dan meningkat menjadi 77,50 persen pada tahun 2015.

Peningkatan angka partisipasi sekolah paling tinggi dialami oleh penduduk yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Menengah Atas dan sederajat. Hal ini dikarenakan, penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan hingga level SMA sederajat tidak sebanyak penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan SD



maupun SMP sederajat. Faktor penyebabnya sebagian besar selain aksesibilitas pendidikan yang kurang juga permasalahan biaya pendidikan dan lebih condong untuk bekerja mencari nafkah membantu keluarga.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Sekolah dan Rasio Guru terhadap Murid
Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2015

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun)*	98,84	99,20	99,22	99,25	99,26
1.2.	Rasio Guru terhadap Murid	1:15	1:17	1:19	1: 25	1:25
2	SMP/MTs					
2.1.	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun)*	84,59	85,05	85,05	85,10	85,61
2.2.	Rasio Guru terhadap Murid	1:16	1:17	1:18	1: 22	1:22
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 tahun)*	55,75	55,06	64,74	77,50	77,50
3.2.	Rasio Guru terhadap Murid	1:16	1:17	1:18	1: 20	1:20

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

b) Kesehatan

Sarana prasarana kesehatan yang menunjang untuk optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat sangat menentukan dalam kebijakan pembangunan dalam bidang kesehatan. Hal ini karena segala fasilitas dan infrastruktur kesehatan sangat berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, perhatian pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan menjadi perlu dan penting untuk ditindaklanjuti.

Pada pelayanan wajib di bidang kesehatanakan menggambarkan sarana dan prasana serta tenaga kesehatan, tenaga medis, dan para medis yang terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2015



No	Fasilitas Kesehatan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rumah Sakit	18	18	18	19	21
2	Kapasitas tempat tidur RS	1.496	1.254	1.441	1.441	1.850
3	Puskesmas Induk	182	192	196	197	195
4	Puskesmas Pembantu	1.024	1.022	1.041	1.041	1.063
5	Polindes/ Poskesdes/ Rumah Bersalin	720	524	486	548	640
6	Dokter Gigi	90	113	146	113	101
7	Dokter Umum	480	533	564	568	466
8	Dokter Spesialis	74	106	118	197	175
9	Bidan	1.798	1.985	1.885	2.305	2500
10	Perawat	4.221	4.863	3.928	4.745	4637
11	Apoteker/Ass Apoteker	318	385	322	458	371

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalteng, 2016

Sarana prasarana kesehatan untuk masyarakat yaitu rumah sakit, pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebanyak 21 buah yang terdiri dari 1 rumah sakit jiwa, 2 rumah sakit TNI/POLRI, 15 rumah sakit daerah, dan 3 rumah sakit swasta. Sedangkan untuk Puskesmas juga mengalami kenaikan dari tahun 2011 menjadi 195 Puskesmas, diikuti oleh jumlah Puskesmas Pembantu yang juga mengalami kenaikan menjadi 1.063 pada tahun 2015.

Pada tahun 2015, jumlah dokter di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 742 orang yang terdiri dari 101 dokter gigi, 466 dokter umum, dan 175 dokter spesialis. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 828 dokter. Selain itu, untuk tenaga kesehatan lainnya seperti bidan berjumlah 2.305 orang, perawat 4.745 orang, apoteker 149 orang, dan asisten apoteker sebanyak 309 orang.

Tabel 2.13
Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan



Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014

No	Rasio	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk	8,0	7,9	7,5	8,0
2	Dokter Per Jumlah Penduduk	0,22	0,26	0,19	0,24
3	Tenaga Medis Per Jumlah Jumlah Penduduk	0,30	0,34	0,29	0,37
4	Posyandu Per Jumlah Balita	10,08	10,59	9,22	10,13
5	Puskesmas Per Jumlah Penduduk	0,08	0,08	0,08	0,08
6	Puskesmas Pembantu Per Jumlah Penduduk	0,46	0,45	0,44	0,40

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalteng, 2015

Jika dilihat dari rasio sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah, kenaikan jumlah penduduk yang signifikan membuat terjadinya penurunan beberapa rasio sarana prasarana kesehatan pada tahun tertentu. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan langkah-langkah khusus yang terintegrasi antara peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan pertumbuhan penduduk yang semakin lama semakin meningkat.

c) Perhubungan

1. Jalan dan Angkutan Darat

Dari total panjang jalan nasional dan provinsi sepanjang 3.102,08 km, kondisi permukaan jalan baik mengalami penurunan dari 1.694,71 km di tahun 2012 menjadi 1.635,51 km pada tahun 2015; kondisi sedang rusak mengalami kenaikan dari 662,89 km di tahun 2012 menjadi 1.133,65 km pada tahun 2015; kondisi rusak mengalami penurunan dari 312,69 km di tahun 2012 menjadi 246,14 km pada tahun 2015; dan kondisi rusak berat mengalami penurunan dari 144,54 km di tahun 2012 menjadi 86,79 km di tahun 2015, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14



Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2015

No	Jalan (Nasional dan Provinsi)	Panjang Jalan (km)				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kondisi Baik	1.431,92	1.694,71	1.647,08	1.595,76	1.635,51
2.	Kondisi Sedang Rusak	1.063,91	662,89	817,52	933,09	1.133,65
3.	Kondisi Rusak	459,46	312,69	250,61	217,95	246,14
4.	Kondisi Rusak Berat	383,29	144,54	99,62	68,03	86,79
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional dan provinsi)	3.338,5	2.814,8	2.814,8	2.814,8	3.102,08

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2016

2. Pelabuhan laut

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pelabuhan laut sebagai sarana jasa perdagangan serta angkutan penumpang dan barang (ekspor dan impor maupun lokal) yang terdiri dari:

a. Pelabuhan Pengumpul:

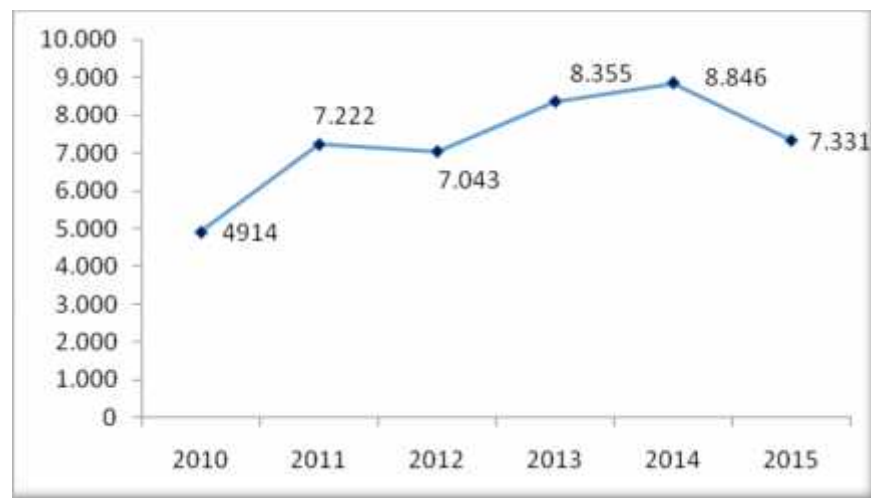
- ✓ Pelabuhan Sukamara,
- ✓ Pelabuhan Kumai,
- ✓ Pelabuhan Pangkalan Bun,
- ✓ Pelabuhan Sampit,
- ✓ Pelabuhan Pulang Pisau, dan
- ✓ Pelabuhan Kuala Kapuas.

b. Pelabuhan Pengumpan:

- ✓ Pelabuhan Pegatan Mendawai,
- ✓ Pelabuhan Kuala Pembuang, dan
- ✓ Pelabuhan Samuda.

Jumlah kapal laut yang melalui pelabuhan laut di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dimana pada tahun 2015 kapal laut yang melalui pelabuhan laut sebanyak 7.331 kapal, menurun 17,13 persen dari tahun sebelumnya (8.846 unit kapal).

Gambar 2.12
Jumlah Kapal yang melalui Pelabuhan Laut
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

3. Bandar udara

Pada Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 9 buah bandar udara yang melayani penerbangan untuk berbagai tipe dan jenis pesawat terbang. Maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan antar kabupaten/kota maupun antar provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain: Garuda Indonesia, Lion Air, Citylink, Trigana Air/Kalstar, Susi Air, dan Aviastar. Disamping itu, untuk melayani kota-kota kecil ada juga pesawat dari MAF yang terbang secara regular serta memiliki fasilitas sistem carter. Selain untuk pelayanan angkutan barang dan penumpang, Bandara Tjilik Riwut sebagai bandar udara provinsi saat ini juga membuka sekolah penerbangan (*flying school*) sebagai salah satu upaya peningkatan sarana prasarana angkutan udara.

Penerbangan udara berangkat dan datang ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mengindikasikan berkembangnya wilayah Kalimantan Tengah karena semakin terbukanya aksesibilitas wilayah regional Kalimantan Tengah. Tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah penerbangan dibandingkan tahun 2014, karena terjadinya bencana kabut asap yang menyebabkan 7 dari 9 bandara yang ada di Kalimantan Tengah lumpuh dan tidak ada penerbangan yang kemudian bertahap kembali normal hingga akhir tahun 2015.



Tabel 2.15
Jumlah Penerbangan dan Penumpang yang melalui Bandar Udara
Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2015

No	Tahun	Penerbangan (arus pesawat)		Penumpang	
		Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2009	6.556	6.577	270.573	264.385
2	2010	6.828	6.825	348.627	341.669
3	2011	8.954	8.949	501.879	499.663
4	2012	10.422	10.418	594.214	610.421
5	2013	12.496	12.507	629.568	664.567
6	2014	10.133	10.137	700.419	701.446
7	2015	9.592	9.597	675.023	650.746

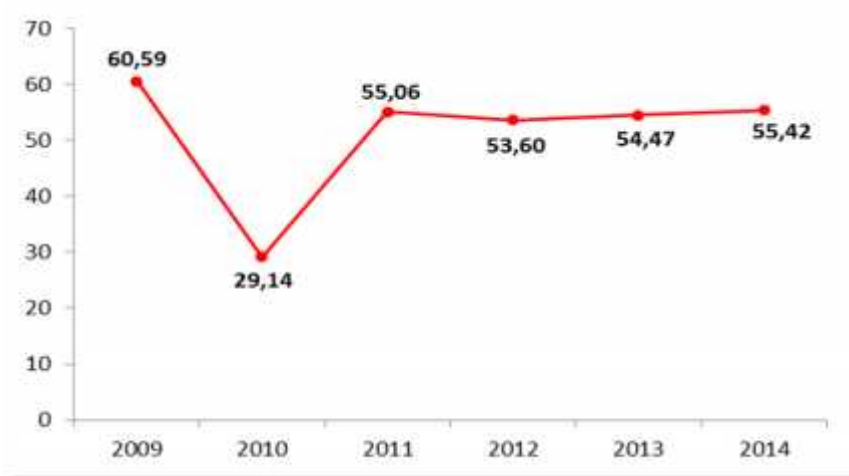
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah

e) Pos, Telekomunikasi, dan Akomodasi

Jenis surat pos yang dikirim berupa surat biasa, tercatat, kilat biasa, kilat khusus, dan kilat tercatat pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan pada kuantitasnya dari 177.860 lembar pada tahun 2013 menjadi 173.761 lembar pada tahun 2014. Sementara pengiriman paket pos mengalami kenaikanyaitu dari 59.223 kg pada tahun 2013 menjadi 61.214 kg pada tahun 2014. Sedangkan untuk pengiriman wesel pos mengalami penurunan dari 193.702 lembar pada tahun 2013 menjadi 169.031 lembar pada tahun 2014.

Jumlah pelanggan telepon di tahun 2014 menurun cukup drastis dimana pada tahun 2013 sebanyak 60.760 SST dan menjadi hanya 53.127 SST saja pada tahun berikutnya. Sedangkan untuk sambungan speedy maupun hotspot cukup tinggi pada tahun 2014 yang mencapai 24.967 jumlah sambungan speedy dan 45 sambungan hotspot.

Gambar 2.13
Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2009-2014



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2015

Terkait fasilitas akomodasi di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 336 unit hotel pada tahun 2014 dengan kapasitas 6.550 kamar dan 9.496 tempat tidur. Dari sejumlah hotel tersebut, tingkat hunian hotel mencapai 55,42 persen pada tahun 2014 dimana angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya (54,47%).

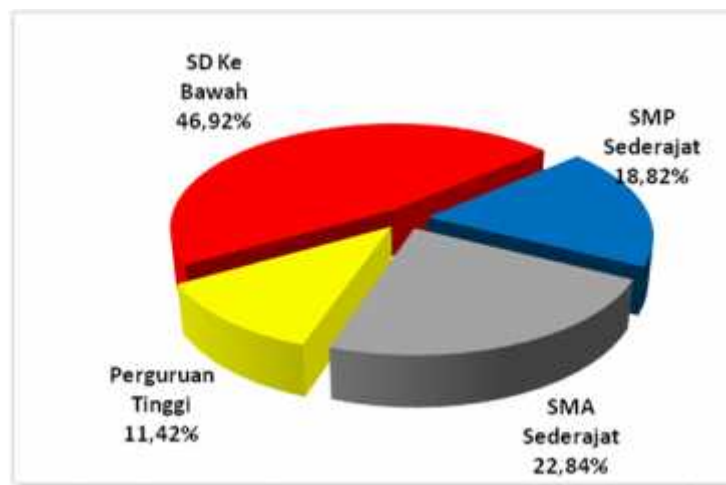
f) Ketenagakerjaan

Hasil rilis ketenagakerjaan terakhir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2016 menunjukkan adanya pelambatan yang digambarkan dengan penurunan jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja. Pada saat yang sama tingkat pengangguran cenderung meningkat dari kondisi Februari 2015. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 sebanyak 1.285.916 orang berkurang sebanyak 2.147 orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2015). Penduduk yang bekerja pada Februari 2016 sebesar 1.238.677 orang juga berkurang sebanyak 8.947 orang dibanding keadaan Februari 2015.

Jika dilihat dari struktur umurnya, sebagian besar penduduk yang bekerja berada pada usia 25 hingga 44 tahun yang merupakan masa produktif penduduk. Selain itu, berdasarkan jenjang pendidikannya penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2016 masih didominasi oleh penduduk bekerja yang berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 581.200 orang (46,92 persen) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 282.906 orang (22,84 persen). Penduduk bekerja dengan pendidikan tinggi (perguruan tinggi) hanya sebanyak 141.501 orang (11,42 persen).

Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA) turun sebanyak 33.699 orang (dari 316.605 orang pada Februari 2015 menjadi 282.906 orang pada Februari 2016) sedangkan untuk pendidikan tinggi (perguruan tinggi) meningkat sebanyak 20.118 orang (dari 121.383 orang pada Februari 2015 menjadi 141.501 orang pada Februari 2016). Sementara penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) naik sebanyak 4.634 orang dari 809.636 orang pada Februari 2015 menjadi 814.270 orang pada Februari 2016.

Gambar 2.14
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016



Sumber: BPS Provinsi Kalteng, 2016 (Kondisi Februari 2016)

Gambar 2.15
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Kondisi Februari 2016)

Jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usahanya, struktur lapangan pekerjaan hingga Februari 2016 tidak mengalami perubahan, dimana Sektor



Pertanian, Perdagangan dan Jasa Kemasyarakatan secara berurutan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya terhadap penyerapan tenaga kerja masih di bawah 10 persen. Selama setahun terakhir (Februari 2015-Februari 2016), jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terjadi di beberapa sektor industri (3,95 persen menjadi 4,62 persen), sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (16,93 persen menjadi 20,01 persen), sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan (1,26 persen menjadi 1,43 persen) serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (16,33 persen menjadi 17,47 persen).

g) Penanaman Modal

Investasi merupakan modal dasar pembangunan perekonomian suatu wilayah dimana semakin kondusif suatu wilayah dalam berinvestasi maka akan semakin optimal pembangunan ekonominya. Oleh karena itu, setiap wilayah administrasi berlomba-lomba dalam menarik investor baik dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya sebagai bagian dari pergerakan ekonomi wilayah.

Tabel 2.16
Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing
Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

Sektor Ekonomi	Dalam Negeri (Juta Rupiah)	Asing	
		Ribu US\$	Juta Rp
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	45.514.351,06	199.463,05	21.361.222,00
Pertambangan	83.456,01	991.401,06	626.114,31
Industri			
- Kayu	0	7.150,00	0
- Minyak	187.499,81	0	349.162,34
- Kimia	12.772,75	0	76.293,06
- Bijih Bauksit	10.000,00	0	0
- Karet Remah	236.155,58	28,93	11.166,10
- Pasir Zircon	0	2.072,15	0
Konstruksi	0,00	0,00	0,00
Perhotelan	0,00	0,00	0,00
Pengangkutan	0,00	0,00	0,00
Perumahan&Kantor	0,00	100,00	0,00



Sektor Ekonomi	Dalam Negeri (Juta Rupiah)	Asing	
		Ribu US\$	Juta Rp
(1)	(2)	(3)	(4)
Jasa-jasa	384.126,74	6.500,00	584.308,19
Jumlah	914.010,89	1.007.152,14	164.044,00

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan, 2016

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki investor yang menanamkan modalnya sebanyak 305 penanaman modal asing dan 163 penanaman modal dalam negeri. Realisasi penanaman modal dalam negeripun pada tahun 2015 dimana pada penanaman modal dalam negeri memiliki realisasi sebesar 914,010 miliar rupiah dan penanaman modal asing sebesar 1,007 miliar US \$ dan 164,044 miliar rupiah.

2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

a) Pertanian

Melihat wilayah geografis dan sejarah sektor lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah selama ini, sektor yang paling memungkinkan untuk dikembangkan adalah sektor pertanian. Sektor tersebut memang menjadi sektor andalan mengingat ketersediaan lahan potensial masih cukup besar. Di sektor pertanian ini, sub sektor yang berpeluang tinggi untuk dikembangkan adalah sub sektor perkebunan yang terlihat dari kontribusi subsektor perkebunan tahunan dalam pembentukan PDRB (mencapai 14,53% pada tahun 2014). Dalam merealisasikan hal tersebut, saat ini sudah masuk permohonan investasi untuk mengembangkan pertanian di sub sektor perkebunan komoditas kelapa sawit, karet, dan singkong dalam skala cukup luas. Bahkan pada tahun 2014, jumlah lahan yang memproduksi aktif mencapai 635.486,23 ha untuk perkebunan rakyat dan mencapai 2.857.051,60 ha untuk perkebunan non rakyat.

Produktivitas terbesar pada komoditas subsektor perkebunan unggulan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah komoditas kelapa sawit yang mencapai 2,75 ton/ha. Tingginya produktivitas ini juga sejalan dengan tingginya produksi kelapa sawit dan luas tanamnya. Komoditas karet juga memiliki produksi yang cukup tinggi mencapai 145.177,06 ton pada tahun 2014 dengan produktivitas sebesar 0,32 ton/ha.

Tabel 2.17
Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Subsektor Perkebunan Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014



No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha/Thn)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Karet	446.943,41	145.177,06	0,32
2	Kelapa Kopra	32.340,70	24.353,64	0,75
3	Kopi	1.752,90	371,01	0,21
4	Lada	921,61	95,74	0,10
5	Kakao	987,16	216,60	0,22
6	Kelapa Sawit	1.297.886,17	3.574.899,33	2,75

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2015

Pada sub sektor perikanan juga memiliki prospek cerah karena Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak kawasan perairan danau yang dapat dikembangkan menjadi usaha perikanan air tawar. Pada subsektor ini, sebagian besar produksi dihasilkan dari budidaya perikanan kolam (28.510,30 ton) dan keramba (27.967,79 ton).

Tabel 2.18
Produksi Budidaya Perikanan (Ton)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Jenis Budidaya	Jumlah Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)
1	Tambak	11.533,01
2	Kolam	28.510,30
3	Keramba	27.967,79
4	Jaring Apung	318,23
5	Rumput Laut	364,43

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Produktivitas padi (sawah maupun ladang) di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun sebelumnya hingga pada tahun 2015 mencapai produktivitas sebesar 3,51 ton/ha dengan total produksi 893.202 ton.

Tabel 2.19
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2015



No	Tahun	Luas Panen		Produksi (ton)		Total luas panen	Total Produksi	Produktivitas Padi (ton/ha)
		Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2009	133.065	81.415	420.407	158.354	214.480	634.887	2,96
2	2010	146.964	100.082	451.762	197.075	247.046	698.808	2,83
3	2011	148.068	66.093	468.168	142.068	214.161	682.329	3,19
4	2012	168.733	83.054	569.818	185.689	251.787	821.605	3,26
5	2013	171.467	78.257	614.884	178.732	249.724	864.608	3,46
6	2014	190.755	55.330	725.704	127.325	246.085	853.029	3,47
7	2015	183.416	71.254	725.755	167.447	254.670	893.202	3,51

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng, 2016

Pada subsektor peternakan jenis ternak, populasi terbesar pada ternak besar adalah ternak babi yang mencapai 190.016 ekor, diikuti oleh ternak sapi (71.445 ekor) dan ternak kambing (43.368 ekor), sedangkan populasi ternak kecil (unggas) didominasi oleh ternak ayam ras broiler yang mencapai 7.658.297 ekor diikuti ternak ayam buras (2.512.553 ekor) dan ternak itik (255.056 ekor).

Jika dilihat dari produksi dagingnya, paling banyak produksi daging adalah ayam ras broiler yang mencapai 11.487.446kg, diikuti daging sapi potong sebanyak 4.056.236 kg, dan daging babi sebanyak 2.074.232 kg.

Tabel 2.20
Populasi dan Produksi Hasil Ternak Menurut Jenis Ternak
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)	Produksi Daging (Kg)	Produksi Telur (Kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Ternak			
1	Sapi Potong	71.445	4.056.236	-
2	Kerbau	11.463	67.146	-
3	Kambing	43.368	335.703	-
4	Domba	1.502	8.832	-
5	Babi	190.016	2.074.232	-
6	Kuda	31	-	-
B.	Unggas			
1	Ayam Buras/ Kampung	2.512.553	1.903.259	2.135.670
2	Ayam Ras/Petelur	155.776	34.582	1.954.939



No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)	Produksi Daging (Kg)	Produksi Telur (Kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Ayam Ras (Broiler)	7.658.297	11.487.446	-
4	Itik	255.056	139.689	1.499.602

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng, 2016

a) Industri

Secara umum industri yang berkembang di provinsi Kalimantan Tengah meliputi industri pengolahan yang merupakan jenis usaha kecil, industri rumah tangga, dan industri menengah yang meliputi industri pangan, sandang, kerajinan, dan per kayu. Dari beberapa jenis usaha kecil dan industri rumah tangga tersebut sudah dapat menampung tenaga kerja yang cukup besar sehingga sektor industri terutama mikro yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah berkembang dengan cukup baik.

Dalam sektor industri pada tahun 2015, peningkatan cukup signifikan terjadi pada industri kecil menengah dimana pada jumlah industry kecil menengah mencapai 5.164 unit perusahaan dengan kapasitas tenaga kerja sebanyak 16.655 pekerja. Lain halnya dengan industri besar dan sedang, mengalami penurunan hingga mencapai 70 unit perusahaan dan juga diikuti oleh penurunan cukup signifikan kapasitas tenaga kerja dari tahun sebelumnya sebanyak 25.542 pekerja sehingga menjadi 16.975 pekerja.

Tabel 2.21
Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Industri						
	Besar dan Sedang	57	59	73	66	80	75
	Kecil Menengah	3.449	4.461	4.401	4.807	4.678	5.164
2	Jumlah Tenaga Kerja						
	Besar dan Sedang	17.317	19.571	15.485	14.761	25.542	16.975
	Kecil Menengah	11.761	15.205	15.103	16.814	16.180	16.655

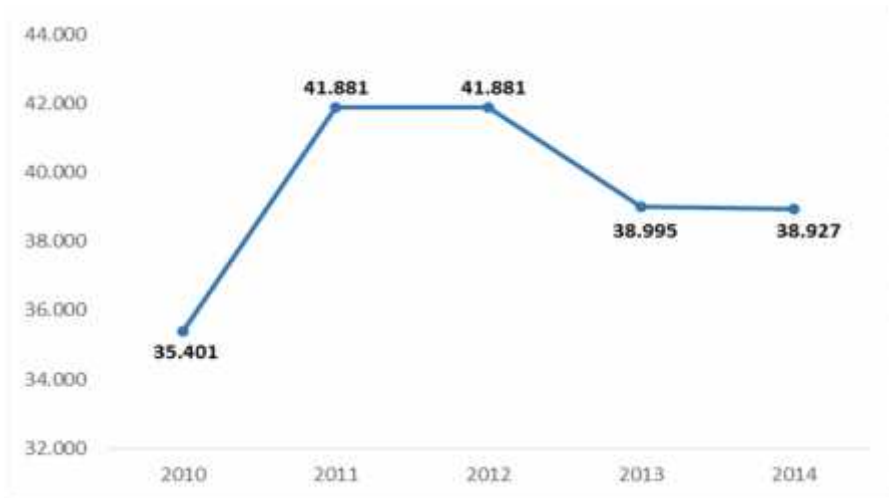
Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

b) Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan.

Secara umum, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata terutama dikarenakan posisi geografis dan kondisi alamnya. Namun potensi yang belum dimaksimalkan tersebut menyebabkan perkembangan pariwisata terkesan stagnan dari waktu ke waktu yang terlihat dari penurunan jumlah wisatawan baik dalam maupun luar negeri dalam mendatangi tempat wisata di Kalimantan Tengah.

Gambar 2.16
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2014



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov.Kalteng, 2015

c) Pertambangan

Dari segi luas wilayah, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan wilayah yang sangat luas tersebut serta letak geografis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, maka secara fisik kawasan ini memiliki beberapa hasil tambang yang cukup potensial. Bahan penggalan yang saat ini telah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi berkembang dengan pesat seperti batubara, emas (dan mineral pengikat seperti perak), bijih besi, galena, mineral bukan logam, bauksit, dan



batuan (bahan untuk bangunan). Dari keseluruhan jenis pertambangan tersebut, tambang batubara masih mendominasi baik terkait eksplorasi (1.664.468,42 ha) maupun produksinya (946.637,08 ha).

Tabel 2.22
Jumlah Izin Usaha Pertambangan dan Luas Wilayah (Eksplorasi dan Produksi)
Menurut Jenis Pertambangan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Jenis Pertambangan	Eksplorasi		Produksi	
		Jumlah IUP	Luas (Ha)	Jumlah IUP	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batubara	181	1.664.468,42	251	946.637,08
2	Bijih Besi	17	199.493,40	23	65.084,98
3	Emas	15	252.976,00	7	25.221,40
4	Tembaga	2	11.292,00	-	-
5	Bauksit	5	29.478,28	10	13.424,89
6	Galena	2	33.064,00	3	7.161,00
7	Batuan	41	81.338,29	39	1.199,10
8	Non Logam	28	277.473,34	56	113.933,93
9	Logam lainnya	3	277.473,34	-	-

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah dan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur.

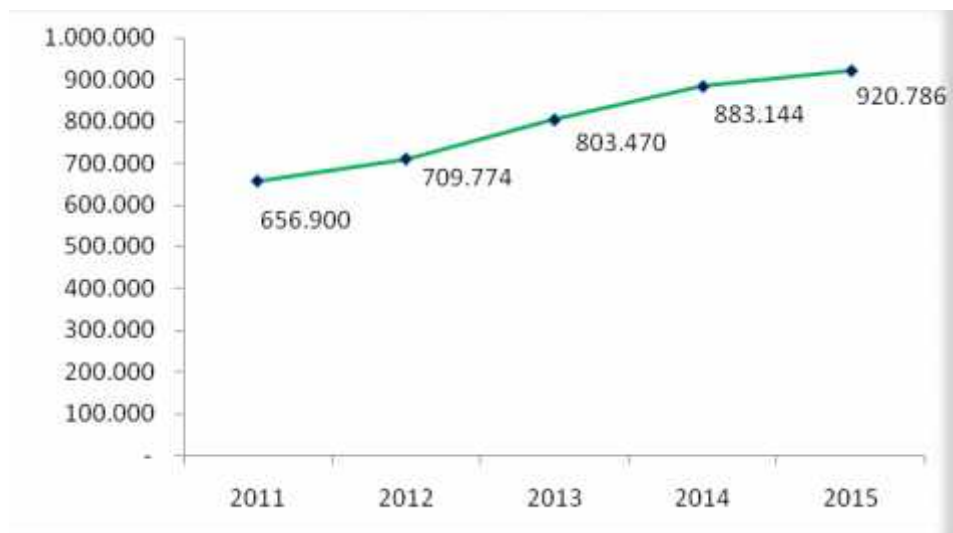
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan oleh satu penduduk dalam rumah tangga untuk dikonsumsi baik komoditas makanan maupun non makanan selama sebulan. Di Provinsi Kalimantan Tengah, rata-rata pengeluaran per kapita meningkat selama lima tahun terakhir hingga pada tahun 2015 mencapai angka Rp. 920.786,-.

Gambar 2.17
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi per Kapita/Bulan (Rp)

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan maka pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita (53,74%) lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan (46,26%).

Tabel 2.23
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Bulan (Rp)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	371.467	285.433	656.900
2	2012	396.135	313.639	709.774
3	2013	443.484	359.986	803.470
4	2014	483.879	399.265	883.144
5	2015	494.858	425.928	920.786

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

b. Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi pertaniannya. NTP akan memperlihatkan kemampuan daya beli petani di wilayah pedesaan sehingga perekonomian petani dapat dianalisis terkait kesejahteraannya.

Jika dilihat dari subsektornya, NTP terbesar adalah petani pada subsektor perikanan yang mencapai 106,65 dan terendah kesejahteraannya adalah petani Tanaman Perkebunan Rakyat yang NTP-nya hanya mencapai 89,66. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Tengah selama Februari 2016 sebesar 97,06 persen, naik 0,13



persen dibandingkan NTP bulan Januari 2016. Hal ini disebabkan oleh kenaikan NTP subsektor hortikultura (1,55 persen), subsektor tanaman pangan (1,06 persen), subsektor perikanan (0,77 persen) dan subsektor peternakan (0,16 persen).

Tabel 2.24
Nilai Tukar Petani per Subsektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Tengah, Februari 2016

No. (1)	Subsektor (2)	NTP (3)
1	Tanaman Pangan	100,26
2	Hortikultura	102,53
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	89,66
4	Peternakan	98,29
5	Perikanan	106,65
Nilai Tukar Petani Gabungan		97,06

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Luas Wilayah (RTRW Provinsi)

Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki integrasi dan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang wilayah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai wilayah yang sebagian besar masih tergolong hutan bioregion, Kalimantan Tengah memiliki RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang berfokus pada pengelolaan hutan. Dalam pengelolaannya, RTRW membagi wilayah menjadi dua kawasan yakni kawasan hutan lindung (3.630.142 ha) dan kawasan budidaya (12.120.330 ha).

Tabel 2.25
Luas Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
Provinsi Kalimantan Tengah

No. (1)	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) (2)	Luas Wilayah (Ha) (3)
A	Kawasan Hutan Lindung	
1	Hutan Lindung (HL)	1.391.604
2	Hutan Adat (HA)	600.000
3	Suaka Margasatwa (SM)	57.389
4	Cagar Alam (CA)	198.597
5	Taman Nasional (TN)	1.168.284
6	Taman Wisata Alam (TWA)	2.954



No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	Luas Wilayah (Ha)
(1)	(2)	(3)
7	Taman Hutan Raya (Tahura)	35.627
8	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada Areal Ex. PLG	154.002
9	Kawasan Konservasi Ekosistem Air Hitam (KEAH)	17.626
10	Kawasan Reservaat	23
11	Kawasan Lindung Lainnya	4.036
Total Kawasan Hutan Lindung		3.630.142
B	Kawasan Budidaya	
1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.335.571
2	Hutan Produksi (HP)	3.896.706
3	Hutan Produksi yang dapat Dikonservasi (HPK)	2.258.274
4	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.629.779
Total Kawasan Budidaya		12.120.330
Total Kawasan Hutan Lindung+Budidaya		15.750.472

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2015; Bappeda Kalteng

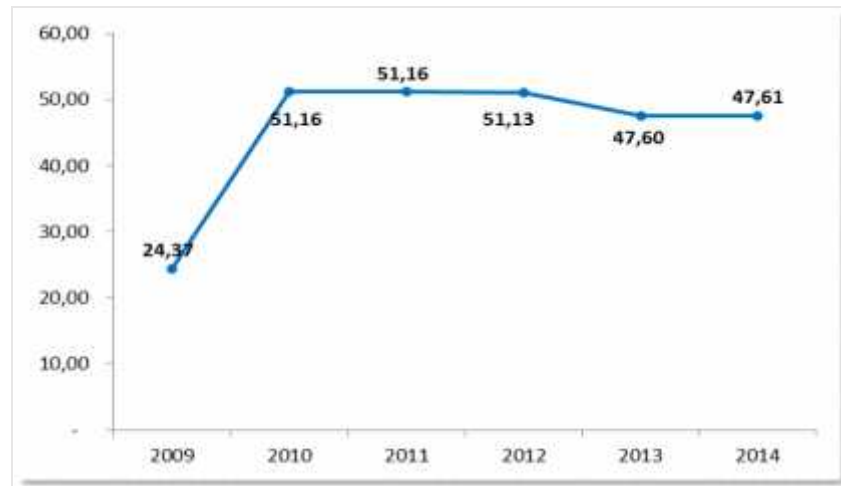
3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal maupun internal. Iklim investasi akan bergerak positif jika kondusivitas suatu wilayah terjaga dengan baik dan memiliki jaminan terhadap keamanan, kondisi demokrasi, hingga aspek sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itulah, keberlangsungan dan kekonsistenan investasi yang masuk ke suatu wilayah menjadi penting adanya untuk menentukan kestabilan pertumbuhan ekonomi.

a. Kriminalitas

Tingginya kriminalitas di suatu wilayah akan memicu penurunan status kenyamanan dalam berinvestasi oleh para investor. Situasi wilayah akan menjadi damai dan aman jika pihak yang berwenang dapat meredam atau meminimalisir kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Tengah cukup fluktuatif meningkat dan menurun secara tidak konsisten. Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan khusus dalam beberapa kasus terutama yang terkait SARA mengingat pernah terjadi kejadian luar biasa di Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 2.18
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2014



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2015 (diolah)

4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang akan menentukan arah tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Sebagai pondasi pelaksana pembangunan, setiap individu menjadi penentu dalam setiap pergerakan pembangunan melalui partisipasinya terhadap program kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itulah, kuantitas disertai kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu fokus tujuan awal pembangunan untuk memperkuat pondasi dalam merealisasikan perencanaan pembangunan daerah.

a. Kualitas Tenaga Kerja

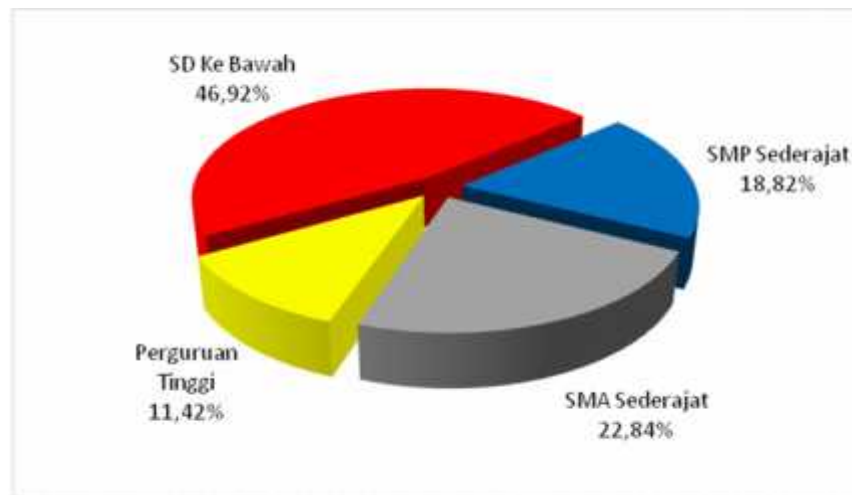
Tenaga kerja merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian suatu wilayah dimana memiliki andil dalam meningkatkan kualitas sistem pembangunan daerah. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja di suatu wilayah, maka diasumsikan semakin tinggi pula kualitas perekonomian di wilayah tersebut. Meskipun begitu, tingginya kualitas tenaga kerja dalam hal ini tidak dipisahkan antara tenaga kerja yang berasal dari dalam wilayah maupun luar wilayah selama mereka bekerja untuk peningkatan perekonomian daerah tersebut.

Sebagian besar penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah hanya pernah mengenyam pendidikan hingga SD sederajatmaupun tidak/belum tamat sekolah yakni sebesar 46,92 persen. Selain itu, tenaga kerja yang memiliki pendidikan hingga SLTA sederajat juga cukup tinggi yakni mencapai 22,84 persen. Sedangkan tenaga kerja yang sekolah hingga perguruan tinggi hanya sebesar 11,42 persen baik sarjana maupun diploma, padahal kategori ini merupakan penduduk

yang diasumsikan memiliki kualitas lebih baik dibandingkan penduduk yang memiliki jenjang pendidikan di bawahnya.

Rendahnya kualitas tenaga kerja dari segi pendidikan ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 2.19
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016 (Kondisi Februari 2016)

b. Rasio Ketergantungan

Salah satu analisis dalam melihat produktivitas penduduk suatu wilayah adalah dengan melihat sebaran kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

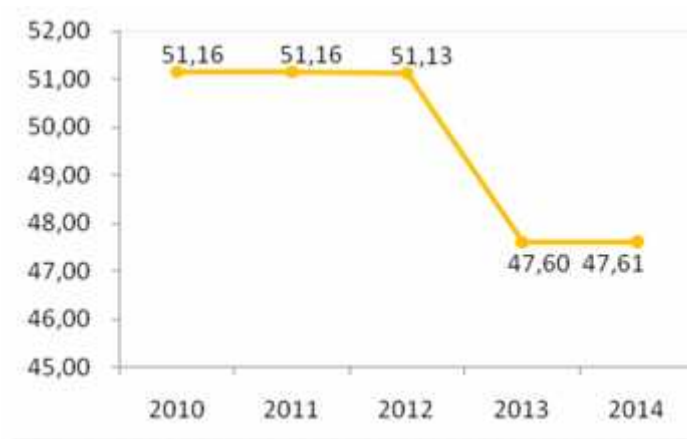
Rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki trend menurun yang berarti sebaran penduduk usia non produktif mulai berkurang jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Hal ini mengindikasikan ketergantungan penduduk usia non produktif semakin berkurang yang disebabkan beberapa kemungkinan seperti pergeseran usia remaja ataupun mortalitas penduduk usia tua.

Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2014 memiliki angka rasio ketergantungan sebesar 47,61 yang memiliki analisa umum yakni setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 47-48 penduduk usia non produktif (usia muda dan usia lanjut).

Gambar 2.20



Rasio Ketergantungan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2015 (diolah)

Tabel 2.26
Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja
Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2015

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Ket.
			2013	2014	2015	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
I	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1.1	Jumlah Penduduk	Jiwa	2.384.733	2.439.858	2.469.077	
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,38	6,21	7,01	
1.3	Laju Inflasi	%	6,79	7,07	4,74	
1.4	Pendapatan per Kapita	Juta Rp	26,63	36,83	40,14	
1.5	Indeks Gini		0,337	0,343	0,317	
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank					
	- 40% Rendah	%	19,63	19,38	t.a.d	
	- 40% Sedang	%	37,52	37,08	t.a.d	
	- 20% Tinggi	%	42,85	43,54	t.a.d	
1.7	Indeks Ketimpangan Kemakmuran		t.a.d	t.a.d	t.a.d	
1.8	Persentase penduduk miskin	%	6,23	6,07	5,91	
1.9	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	kasus	2.230	2.411	2.375	
Fokus Kesejahteraan Masyarakat						



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Ket.
			2013	2014	2015	
1	Pendidikan					
1.1	Angka Melek Huruf	%	99,40	99,59	99,59	
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,17	8,17	8,17	
1.3	APK SD/MI	%	117,59	117,59	117,60	
1.4	APK SMP/MTs	%	94,42	95,62	96,15	
1.5	APK SMA/SMK/ MA	%	68,09	83,07	83,07	
1.6	APM SD/ MI	%	99,22	99,25	99,26	
1.7	APM SMP/MTs	%	85,05	85,10	85,61	
1.8	APM SMA/SMK/MA	%	64,74	77,50	77,50	
2	Kesehatan					
2.1	Angka Harapan Hidup	tahun	69,29	69,39	69,54	
2.2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		177,6	185	198	
2.3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		7	7	8	
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	%	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
3	Pertanahan					
3.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan	%	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
4	Ketenagakerjaan					
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,00	3,24	4,54	
Fokus Budaya dan Olahraga						
1	Kebudayaan					
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	1,47	1,47		
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	0,08	0,08		
2	Pemuda dan Olahraga					
2.1	Jumlah Klub Olahraga	Unit	26	46	46	
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	15	16	16	
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Fokus Layanan Urusan Wajib						
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Dasar					
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun	%	99,05	99,46		
1.1.2	Rasio murid terhadap sekolah					
	- SD Negeri	Rasio	112,28	112,28	101,92	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Ket.
			2013	2014	2015	
	- SD Swasta	Rasio	205,50	205,50	122,94	
	- MI	Rasio	129,21	134,77	119,36	
1.1.3	Rasio murid terhadap guru					
	- SD Negeri	Rasio	11,19	11,19	10,78	
	- SD Swasta	Rasio	22,07	22,07	10,98	
	- MI	Rasio	10,27	10,10	8,42	
1.1.4	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Rasio	113,73	113,84	113,97	
1.2	Pendidikan menengah					
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah					
	- 13-15 tahun	%	85,05	85,10	85,61	
	- 16-18 tahun	%	64,74	77,50	77,50	
1.2.2	Rasio murid terhadap sekolah					
	- SMP Negeri	Rasio	138,91	138,91	136,73	
	- SMP Swasta	Rasio	111,86	111,86	102,31	
	- MTs	Rasio	146,16	170,00	195,65	
	- SMA Negeri	Rasio	258,58	260,21	260,01	
	- SMA Swasta	Rasio	98,43	98,46	90,50	
	- MA	Rasio	149,02	142,11	120,77	
	- SMK	Rasio	198,31	205,22	222,98	
1.2.3	Rasio murid terhadap guru					
	- SMP Negeri	Rasio	11,45	11,45	13,26	
	- SMP Swasta	Rasio	14,46	14,46	14,19	
	- MTs	Rasio	9,24	10,13	9,52	
	- SMA Negeri	Rasio	11,24	11,38	11,31	
	- SMA Swasta	Rasio	7,28	7,03	5,73	
	- MA	Rasio	7,75	7,88	6,36	
	- SMK	Rasio	11,96	12,76	10,04	
1.2.4	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah					
	- Menengah Pertama	Rasio	142,90	147,97	143,02	SMP
	- Menengah Atas	Rasio	398,13	386,18	361,02	
1.3	Angka Putus Sekolah					
	- SD/MI	%	0,42	0,41	0,41	SD
	- SMP/Mta	%	1,92	1,90	1,86	SMP
	- SMA/SMK/MA	%	5,87	5,08	4,65	SMA/S MK
1.4	Angka Kelulusan					
	- SD/MI	%	100	100	100	
	- SMP/MTs	%	99,13	99,74	100	
	- SMA/SMK/MA	%	99,66	99,01	100	
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi min. S1/D-IV	Orang	5.047	5.439	6.190	
2	Kesehatan					



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Ket.
			2013	2014	2015	
2.1	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Per 100.000 Orang	19,63	19,41	22,72	
2.2	Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas+pustu	Per 30.000 Orang	2,45	2,41	2,34	
2.3	Rasio posyandu per satuan balita		1	1	1	
2.4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		t.a.d	t.a.d	t.a.d	
2.5	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	89,7	86,7	79,5	
2.6	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
2.7	Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
2.8	Cakupan Puskesmas+Pustu		9,10	8,98	t.a.d	
3	Pekerjaan Umum					
3.1	Panjang Jalan	Km	1.100	1.100	1.100	Jalan Provinsi
3.2	Proporsi kondisi jalan baik	%	86,72	87,05	87,52	Jalan Provinsi
3.3	Irigasi dalam kondisi baik	Ha	109.441	133.809	85.509	
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	44,05	44,05	44,10	
3.5	Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	%	12,8	12	11,37	
4	Perumahan					
4.1	Persentase rumahtangga dengan sumber air bersih	%	71,20	79,40	82,30	
4.2	Persentase rumahtangga dengan air minum layak	%	39,80	44,41	57,90	
4.3	Persentase rumahtangga dengan sanitasi layak	%	44,05	44,05	44,10	
4.4	Persentase rumahtangga penerangan listrik	%	65,1	69,3	70,2	
4.5	Persentase rumah layak huni	%	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
5	Penataan Ruang					



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Ket.
			2013	2014	2015	
5.1	Luas lahan pemukiman	Ha	1.581.258	1.581.258	t.a.d	
6	Perhubungan					
6.1	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	825.649	948.226	1.287.287	
6.2	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian	932	940	959	
6.3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	M	18,23	15,88	13,70	
6.4	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	Orang	169.872	171.948	172.948	
6.5	Jumlah penumpang angkutan laut yang turun	Orang	291.699	274.901	218.143	
6.6	Jumlah penumpang angkutan laut yang naik	Orang	249.801	223.249	189.990	
6.7	Jumlah penumpang angkutan udara yang datang	Orang	664.567	701.446	650.746	
6.8	Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat	Orang	629.568	700.419	675.023	
7	Lingkungan Hidup					
7.1	Persentase penduduk berakses air minum	%	39,8	44,41	57,9	
7.2	Indeks kualitas air sungai	TSS (mg/l)	157,86	78,62	0	
		DO (mg/l)	5,08	5,36	0	
		BOD (mg/l)	1,33	12,25	0	
		COD (mg/l)	51,07	55,61	0	
		Total Coli (jml/100ml)	648,11	11,436.02	0	
7.3	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	19	18	25	
7.4	Persentase sampah terangkut per hari	%	57,80	58,21	59,53	
8	Kependudukan dan Catatan Sipil					
8.1	Kepemilikan KTP	Orang	1.201.238	1.202.363	1.303.951	
8.2	Kepemilikan Akta Kelahiran	Orang	112.748	273.815	420.647	
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
9.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS Pemprov Kalteng)	%	-	33,87	50,15	
9.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	48,94	53,55	t.a.d	
9.3	Banyaknya anak	Anak	t.a.d	53	3.434	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Ket.
			2013	2014	2015	
	terlantar (0-21 tahun)					
9.4	Pekerja Anak	%	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
10	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
10.1	Persentase akseptor KB terhadap PUS	%	77,00	76,47	78,19	
10.2	Banyaknya peserta baru KB	Orang	94.199	69.531	62.582	
10.3	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	Orang	52.041	52.300	55.110	
11	Sosial					
11.1	Banyaknya panti asuhan	Unit	43	43	66	
11.2	Banyaknya anak yang di asuh di panti asuhan	Anak	1.950	2.237	4.810	
11.3	Banyaknya panti wredha	Unit	1	1	1	
11.4	Banyaknya penghuni panti wredha	Orang	110	100	100	
12	Ketenagakerjaan					
12.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,50	68,56	71,11	
12.2	Persentase penduduk bekerja thd usia kerja	%	66,44	66,34	67,88	
13	Koperasi usaha kecil dan menengah					
13.1	Jumlah Koperasi aktif	Unit	2.215	2.268	2.405	
13.2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
14	Penanaman Modal					
14.1	Realisasi proyek PMDN	Juta Rp	39.637.132,18	46.360.379,83	33.138.153,41	
14.2	Realisasi proyek PMA	Dalam Dolar dan Rupiah	1.952.186 (US \$ 000) 17.912.669,22 (Juta Rupiah)	2.324.198,57 (US \$ 000) 24.003.491,49 (Juta Rupiah)	1.088.577,73 (US \$ 000) 28.003.814,01 (Juta Rupiah)	
15	Kebudayaan					
15.1	Jumlah event budaya	Event	1	2	1	
15.2	Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala	Unit	490	490	500	
15.3	Jumlah museum	Unit	1	1	1	
15.4	Jumlah taman budaya	Unit	1	1	1	
15.5	Jumlah desa kerajinan tradisional	Desa	0	0	0	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Ket.
			2013	2014	2015	
16	Kepemudaan					
16.1	Jumlah karang taruna	Unit	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
17	Ketahanan Pangan					
17.1	Ketersediaan pangan utama	ton	812.652	838.207	893.202	
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
18.1	Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	Unit	1.432	1.432	1.434	
18.2	Jumlah LSM dan Ormas	Unit	-	127	138	
19	Statistik					
19.1	Publikasi “Daerah Dalam Angka”		Ada	Ada	Ada	
19.2	Publikasi “PDRB”		Ada	Ada	Ada	
20	Komunikasi dan Informatika					
20.1	Website milik pemerintah daerah		Ada	Ada	Ada	
20.2	Persentase penduduk menggunakan HP	%	75,83	76,62	77,33	
21	Perpustakaan					
21.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	135	135	135	
22	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian					
22.1	Jumlah PNS	Orang	4.628	4.903	5.084	
22.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	Kasus	70	74	82	
22.3	Opini BPK		WDP	WTP	WTP	
22.4	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		79,84	81,26	t.a.d	
Fokus Urusan Pilihan						
1	Pertanian					
1.1	Produksi padi	Ton	864.608	853.029	893.202	
1.2	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha	Ton	3,46	3,47	3,51	
1.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	18,56	19,43	18,51	
1.4	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	2,13	2,20	2,33	
1.5	Kontribusi subsektor	%	13,73	14,49	13,41	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Ket.
			2013	2014	2015	
	perkebunan terhadap PDRB					
2	Kehutanan					
2.1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,51	1,59	1,74	
3	Energi dan Sumber Daya Mineral					
3.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	18,80	13,10	10,77	
4	Pariwisata					
4.1	Jumlah wisnus dan mancanegara	Orang	218.245	252.901	373.610	
5	Kelautan dan Perikanan					
5.1	Produksi Perikanan	Ton	156.491,87	164.930,79	199.292,95	
5.2	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	2,58	2,46	2,60	
6	Perdagangan					
6.1	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	10,04	11,33	11,64	
6.2	Nilai ekspor	Juta US \$	1.402,69	1.096,62	1.062,69	
6.3	Nilai Impor	Juta US\$	82,65	106,69	70,97	
6.4	Neraca perdagangan luar negeri	Juta US \$	1.320,04	989,93	991,72	
7	Perindustrian					
7.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	13,69	16,04	16,15	
7.2	Kontribusi subsektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	%	8,96	8,47	10,77	
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian					
1.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	803.470	883.144	920.786	
1.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	443.484	483.879	494.858	
1.3	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	359.986	399.265	425.928	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Ket.
			2013	2014	2015	
1.4	PDRB per kapita	Juta Rp	34,37	36,84	40,14	
1.5	Jumlah Koperasi aktif	Unit	2.215	2.268	2.405	
2	Pertanian					
2.1	Nilai tukar petani	%	98,31	101,29	98,66	
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
1	Perhubungan					
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	M	18,23	15,88	13,70	
2	Penataan Ruang					
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	Ha	2.150.677	2.394.714	2.594.715	
2.2	Luas wilayah produktif	Ha	2.763.953	2.956.780	3.438.966	
2.3	Luas wilayah Industri	Ha	40.233	42.159	44.302	
2.4	Luas wilayah perkotaan	Ha	410.555	430.239	455.182	
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian					
3.1	Jumlah kantor perbankan	Unit	149	245	t.a.d	
3.2	Jumlah akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	317	336	341	
3.3	Jumlah rumah makan/restoran	Unit	-	502	503	
4	Lingkungan Hidup					
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	71,20	79,40	82,30	
5	Komunikasi dan Informatika					
5.1	Daya listrik yang diproduksi	MWh	995.077,59	1.127.073,91	1.194.615,408	
5.2	Jumlah pelanggan listrik	titik	108.781	152.768	478.124	
Fokus Iklim Berinvestasi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian					
1.1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Juta Rp	79.023.844,32	95.930.055,59	74.203.700,18	
Fokus Sumber Daya Manusia						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian					
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		67,41	67,77	-	
1.2	Indeks Pemberdayaan		68,61	77,90	-	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Ket.
			2013	2014	2015	
	Gender (IDG)					
1.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		88,47	89,33	-	
1.4	Rasio ketergantungan		47,60	47,61	-	

Sumber: Gabungan dari berbagai sumber (diolah), 2016

2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun Lalu (Tahun 2015)

Memasuki tahapan-tahapan awal pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021, pemerintah daerah memiliki "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan yakni pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana terpapar dalam visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, evaluasi pembangunan daerah terhadap program-program kerja pemerintah daerah akan menjadi tahapan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam penyelesaian perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan lima tahun yang lalu.

Dilaksanakannya evaluasi ini akan memberikan masukan mengenai ketidakcocokan atau kesalahan penetapan program prioritas, permasalahan baru yang timbul, hingga inefisiensi anggaran sehingga untuk perencanaan pembangunan ke depan dapat diantisipasi segala kendala maupun hambatan. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program kegiatan menuju ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2017, hasil evaluasi dari status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah didasarkan atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2015. Selain itu, evaluasi yang tidak kalah pentingnya adalah realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja setiap SKPD pada tahun sebelumnya dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro pembangunan daerah, realisasi indikator hingga tahun 2015 menunjukkan trend peningkatan. Sebagai salah satu fokus utama pembangunan



yakni pertumbuhan ekonomi dimana pada tahun 2015 mencapai 7,01 persen, yang mana angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang mencapai 6,21 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 masih dibawah target RPJMD Tahun 2010-2015 yakni sebesar 7,5 persen.

Sementara itu, beberapa target pembangunan daerah lain juga belum tercapai sesuai harapan RPJMD seperti capaian inflasi sebesar 4,74 persen (target sebesar 2,5%), angka kemiskinan sebesar 5,91 persen kondisi September 2015 (target sebesar 2,0%), tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,54 persen kondisi Agustus 2015 (target sebesar 2,0%), dan lain sebagainya. Bila dilihat dari capaian target pembangunan tahun 2015 tersebut, maka perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk mewujudkan pembangunan daerah sesuai target kinerja pembangunan tahun 2017 seperti yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Oleh karena itu, dalam rangka “mengejar” pencapaian target RPJMD terutama untuk beberapa target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya, perlu dilakukan penajaman, penyempurnaan, revisi, hingga penggantian program/kegiatan yang telah ditetapkan sesuai RPJMD atau program/kegiatan strategis pada perencanaan periode sebelumnya.

Tabel 2.27
Target dan Realisasi Kinerja Daerah dalam RPJMD
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2015

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA (%)									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	6,74	6,9	6,69	7,1	7,38	7,3	6,21	7,5	7,01
2.	Laju Inflasi (%)	6	4,55	5	5,85	4	6,79	3,0	7,07	2,5	4,74
3.	Angka Kemiskinan (%)	4,5	6,64	3,5	5,85	4	6,79	2,5	6,03	2,0	5,91
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5	2,55	3	3,17	2,75	3,09	2,5	3,24	2,0	4,54

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016

Program/kegiatan yang mengacu pada empat strategi prioritas nasional yakni *pro poor*, *pro growth*, *pro job*, dan *pro environment*, perlu terus dilanjutkan pada tahun 2016. Berdasarkan data capaian di atas, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 belum melebihi target, harapan kondisi perekonomian secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebagaimana yang ditargetkan dapat terpenuhi. Secara



umum memang laju inflasi, kemiskinan, maupun pengangguran tidak mencapai target, akan tetapi jika dilihat pada level nasional maka capaian pembangunan tersebut sudah dapat dikatakan luar biasa dari segi kuantitas nilai, namun dari segi kualitas harus diperhatikan pula sebagai penjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program terhadap target RKPD tahun 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. PENDIDIKAN

Pada tahun 2015, program yang telah maupun belum memenuhi target kinerja yang telah dicapai pada bidang pendidikan, adalah :

1. Realisasi program atau kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada tahun 2015 :

Program atau kegiatan yang masih mencapai target kinerja pada tahun 2015 adalah Program Pendidikan Non Formal, Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan, Program Pendidikan Menengah II, dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun II.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada tahun 2015 adalah:
 - a. Program Pendidikan Menengah;
 - b. Program Pendidikan Luar Biasa;
 - c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
 - d. Program Pendidikan Tinggi;
 - e. Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Secara Proporsional;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,



Kewenangan provinsi di bidang pendidikan terbatas, walaupun jumlah uang cukup akan tetapi tidak dapat digunakan untuk program-program tertentu yang bukan kewenangannya.

4. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Perlu dianggarkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang belum tersedia dananya bagi pencapaian target program,
 - b. Karena menyangkut kewenangan, maka pendanaan melalui belanja tidak langsung di Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, untuk pencapaian target kinerja.

B. KESEHATAN

Realisasi program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang kesehatan adalah :

1. Realisasi program atau kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada tahun 2015 :

Program atau kegiatan yang belum memenuhi target kinerja untuk bidang kesehatan adalah berkenaan dengan program pengembangan lingkungan sehat, program standarisasi pelayanan kesehatan dan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada tahun 2015 adalah:
 - a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. Program Pengembangan Obat Asli Daerah;
 - c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - f. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
 - g. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
 - h. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
 - i. Program peningkatan pembiayaan jaminan kesehatan;
 - j. Program sumber daya kesehatan masyarakat;



3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan, antara lain keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan.

C. PEKERJAAN UMUM

Untuk realisasi program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang pekerjaan umum adalah

1. Realisasi program atau kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang pada tahun 2015

Program semua memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2015

2. Realisasi program atau kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada tahun 2015 adalah :

- a. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- b. Program pembangunan sistim informasi/data base jalan dan jembatan;
- c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
- e. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;
- f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- g. Program Perencanaan Tata Ruang;
- h. Program Pemanfaatan Ruang
- i. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan antara lain keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah



- a. Jalan yang dalam kondisi baik tidak akan meningkat, karena kerusakan jalan tidak tertangani dan panjang Jalan yang dipelihara juga terbatas,
 - b. Jaringan Irigasi/Rawa terbatas, sehingga layanan air pada areal pertanian masih terbatas, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya target produksi pertanian, terutama padi.
5. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- a. Perlu dianggarkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang belum tersedia dananya bagi pencapaian target program,
 - b. Perlu kegiatan-kegiatan prioritas karena keterbatasan dana untuk pencapaian target.

D. PERHUBUNGAN

Untuk realisasi program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang perhubungan adalah

1. Realisasi program atau kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun 2015
Program atau kegiatan yang belum memenuhi target kinerja untuk bidang perhubungan adalah Program Peningkatan Kelembagaan dan Kualitas Aparatur.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun 2015 adalah :
 - a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan;
 - c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
 - d. Program Penataan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - e. Program Peningkatan Kelembagaan dan Kualitas Aparatur;
 - f. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
 - g. Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan;
 - h. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan II;



E. KOMUNIKASI

Untuk realisasi program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang komunikasi dan informatika adalah

1. Realisasi program atau kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun 2015

Program atau kegiatan yang belum memenuhi target kinerja untuk bidang komunikasi tidak ada.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun 2015 adalah :

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media;
- c. Program Pengembangan Pos, Telekomunikasi dan Informatika;
- d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

F. LINGKUNGAN HIDUP

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang lingkungan hidup adalah

1. Realisasi program atau kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang pada tahun 2015 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2. Realisasi program atau kegiatan yang akan dan telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan adalah :

- a. Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;
- c. Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH;
- d. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

G. SOSIAL

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang sosial adalah



1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
Dari hasil evaluasi program atau kegiatan pada tahun 2015 yang belum tercapai adalah tidak ada.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Program Pembinaan Anak Terlantar
 - d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
 - e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
 - f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial;
 - g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - h. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

H. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang ketenagakerjaan adalah

Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tidak ada

1. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - d. Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - e. Program Pengembangan Data dan Informasi
 - f. Program pengembangan wilayah transmigrasi



- g. Program Percepatan Pertumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
 - h. Program Percepatan Pertumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
 - i. Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi
2. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
 3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,

Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi capaian yaitu karena kurangnya informasi/laporan dari pihak pengguna sehingga penempatan tenaga kerja tidak semua terdata di dinas yang menangani ketenagakerjaan kabupaten/kota. Untuk masa mendatang, hal tersebut akan lebih digalakkan melalui pengembalian Kartu AK1 dari penerima tenaga kerja kepada dinas yang mengeluarkan AK1, sehingga setiap penempatan tenaga kerja dapat terdata. Hal lain yang menjadi isu strategis yang mempengaruhi rendahnya penempatan tenaga kerja adalah masih terbatasnya lowongan kerja dan kurang lancarnya informasi tentang pasar kerja. Untuk itu di tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan perluasan kesempatan kerja melalui pembentukan/pengembangan usaha mandiri dan usaha produktif serta meningkatkan pendataan lowongan dan mengaktifkan Bursa Kerja Online (BKOL).

I. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang kepemudaan dan olahraga adalah

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tidak ada
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
 - b. Program peningkatan peran serta kepemudaan



- c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- d. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
- e. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- f. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
- g. Program pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga
- h. Program peningkatan budaya dan prestasi olah raga

J. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang koperasi dan UMKM adalah

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, tidak ada
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a. Program penguatan kelembagaan koperasi
 - b. Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM
 - c. Program peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, tidak ada

K. URUSAN PENANAMAN MODAL

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang penanaman modal adalah

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan adalah :
 - a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - c. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
 - d. Program peningkatan pelayanan secara terpadu



2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan adalah program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, tidak ada

L. URUSAN PERTANIAN

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang pertanian adalah

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tidak ada
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a. Program peningkatan kesejahteraan petani
 - b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 - c. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - d. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
 - e. Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - f. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
 - g. Program penanganan kawasan lahan gambut
 - h. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil untuk urusan pertanian.

M. URUSAN PERKEBUNAN

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang perkebunan adalah

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, tidak ada



2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a. Program peningkatan kesejahteraan petani
 - b. Program peningkatan ketahanan pangan
 - c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 - d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
 - e. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - f. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, tidak ada.

N. URUSAN KEHUTANAN

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang kehutanan adalah

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Beberapa program yang belum memenuhi target kinerja adalah:

- a. Program perencanaan dan pengembangan hutan
 - b. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, yakni tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja.

O. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang kelautan dan perikanan adalah



1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan adalah Program Peningkatan Kompetensi Laboratorium Perikanan
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a. Program pengembangan perikanan tangkap
 - b. Program peningkatan daya saing produk perikanan
 - c. Program pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir
 - d. Program pengawasan dan pengendalian SDKP
 - e. Program peningkatan produksi perikanan budidaya
 - f. Program pengembangan wirausaha
 - g. Program perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, yakni tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja.

P. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang ketahanan pangan adalah

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan adalah :
 - a. Program kerawanan dan kewaspadaan pangan
 - b. Program good governance
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a. Program pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat
 - b. Program ketahanan pangan dan gizi keluarga
 - c. Program peningkatan ketahanan pangan Kalteng Besuh
 - d. Program agribisnis pertanian dan keamanan pangan
 - e. Program peningkatan kesejahteraan petani



- f. Program peningkatan ketahanan pangan
- g. Program pengembangan kelembagaan dan SDM
- 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, yakni tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil untuk urusan ketahanan pangan.

Q. URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah

- 1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Tidak ada program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- 2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Semua program atau kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Tidak ada program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

R. URUSAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang pertambangan dan energi adalah

- 1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:

Tidak ada program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- 2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:

Semua program atau kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.



3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:

Tidak ada program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

S. URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Untuk program yang telah memenuhi target dan yang belum pada tahun 2015 di bidang perindustrian dan perdagangan adalah

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:

Tidak ada program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:

Semua program atau kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:

Tidak ada program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Selain strategi prioritas nasional, fokus utama dalam evaluasi pembangunan adalah pencapaian indikator sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, seperti terlihat pada tabel 2.28 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 pada beberapa Perangkat Daerah. Tabel evaluasi yang lengkap pada semua Perangkat Daerah tidak ditampilkan dalam dokumen RKPD ini, namun dituangkan dalam lembar kerja (*worksheet*) penyusunan RKPD 2017.